



DJKN

KPKNL
JAKARTA III

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



KPKNL JAKARTA III

KPKNL Jakarta III STAR

Santun, Tertib, Amanah, Responsif

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Berpedoman pada peraturan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan organisasi yang tertuang dalam sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, telah mendorong DJKN untuk menerapkan sistem *Balance Scorecard Card (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. Kinerja KPKNL Jakarta III dinilai berdasarkan IKU yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Jakarta III Tahun 2025.

Laporan capaian kinerja tahun 2025 KPKNL Jakarta III menyajikan hasil pencapaian terhadap 8 (delapan) Sasaran Strategis Kemenkeu *Three* KPKNL dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, yang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 sebesar 116,79%. Hasil capaian tersebut tentunya menjadi motivasi bagi kami untuk semakin lebih baik lagi di tahun berikutnya.

Dengan slogan “Santun, Tertib, Amanah, Responsif (STAR)” dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, serta budaya kerja sesuai Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan dan bermanfaat bagi pengguna jasa.

Umpan balik berupa kritik dan saran yang membangun dari para pengguna jasa sangat dibutuhkan sebagai bahan refleksi bagi kami untuk terus berbenah dalam memberikan layanan yang prima.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Rina Yulia



RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III dalam mengelola kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan penilaian, dan pelayanan lelang disampaikan kepada *stakeholders* melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Jakarta III Tahun 2025. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis, LAKIN KPKNL Jakarta III Tahun 2025 merupakan bahan monitoring dan evaluasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi DJKN yaitu:

”Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Jakarta III memiliki 5 (lima) misi yang selaras dengan visi misi DJKN yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum., pemulihan aset, serta mendukung proses penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kementerian Keuangan Satu.

Dalam menjalankan tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta III menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara.

4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian.
6. Pelaksanaan pelayanan lelang.
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang.
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil Lelang.
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta III. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Jakarta III Tahun 2025, telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) IKU dengan capaian 116,79% sebagai berikut:

KODE	IKU	V/C	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120
Stakeholder Perspective (30%)						
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya					
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100,00%	133,72%	133,72	120,00
1b-CP	Indeks Integritas	P/L	100,00	105,29	105,29	105,29
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	P/M	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Customer Perspective (20%)						
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					

2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	100,00%	121,46%	121,46	120,00
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/L	100,00%	101,19%	101,19	101,19
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100,00%	100,49%	100,49	100,49
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74,00	117,50	158,78	120,00
Internal Process Perspective (25%)						
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif					
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100,00%	123,57%	123,57	120,00
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	P/M	100,00%	120,00%	120,00	120,00
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	100%	231,33%	231,33	120,00
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70%	109,66%	156,66	120,00
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80,00%	105,30%	131,62	120,00
Learning and Growth Perspective (25%)						
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	P/M	100,00	120,00	120,00	120,00
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100,00	120,00	120,00	120,00
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	80,00%	98,00%	122,50	120,00
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif					
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100,00	117,42	117,42	117,42
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80,00	117,25	146,56	120,00

8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif					
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	80,00	99,52	124,40	120,00
8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	P/M	95,30%	110,65%	116,11	116,11
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	P/M	100,00	135,14	135,14	120,00
NKO					116,79	

Dalam proses pencapaian kinerja selama tahun 2025, tentunya KPKNL Jakarta III tidak terlepas dari berbagai hambatan yang harus dihadapi. Namun demikian, berlandaskan pada semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesional, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, seluruh pegawai KPKNL Jakarta III telah berkomitmen untuk selalu mengupayakan yang terbaik dan optimistis dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Selanjutnya, di masa yang akan datang diharapkan semua capaian sasaran strategis dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan lebih baik dari tahun 2025.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	vi

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
	C. Aspek Strategis Organisasi	5
	D. Isu Strategis Organisasi	8
	E. Sistematika Laporan	9

BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Perencanaan Strategis	11
	B. Penetapan Perjanjian Kinerja	14
	C. Addendum Perjanjian Kinerja	15

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	16
	B. Kinerja Lainnya	42
	C. Realisasi Anggaran	43

BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan Umum	44
	B. Strategi Pemecahan Masalah untuk Tahun Mendatang	44

LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
NKO 2025	
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h), Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 adalah unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KPKNL Jakarta III dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Jakarta III dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 berdasarkan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

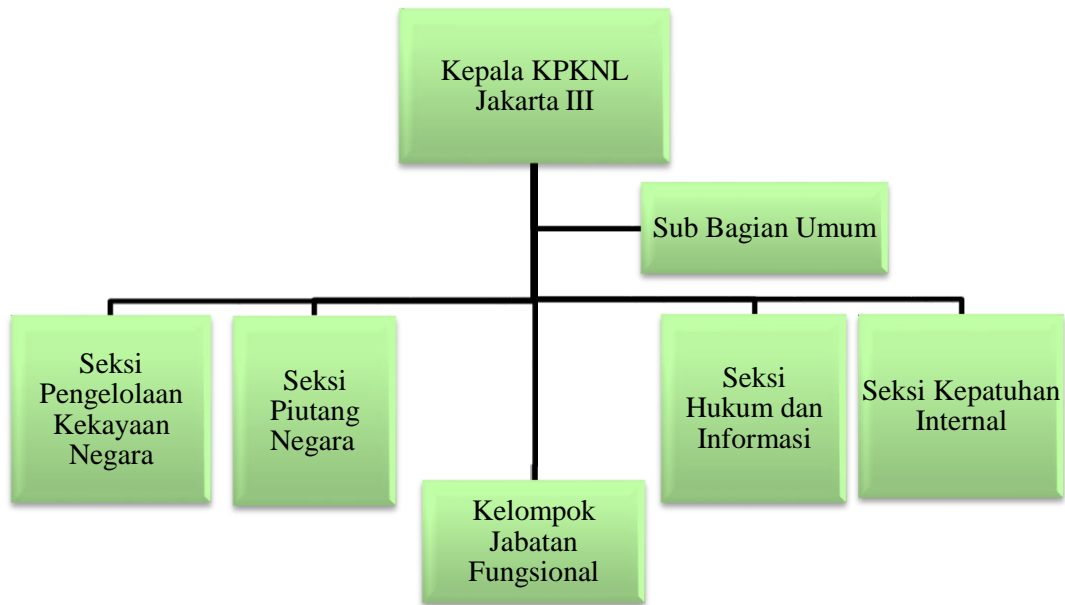
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/ tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Jakarta III mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung utang/penjamin utang.
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah utang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung utang dan/atau penjamin utang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian.
6. Pelaksanaan pelayanan lelang.
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Struktur Organisasi KPKNL Jakarta III



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Jakarta III didukung oleh 41 (empat puluh satu) orang pegawai (termasuk 1 orang pegawai tugas belajar dan 1 orang pegawai cuti besar) dengan komposisi sebagai berikut.

Komposisi Pegawai berdasarkan Gender

No	Gender	Total Pegawai
1.	Laki-laki	24
2.	Perempuan	17
Total Pegawai		41

Data Kepegawaian per 31 Desember 2025

Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Total Pegawai
1.	SMA	1
2.	D1	1
3.	D3	3
4.	D4/S1	28
5.	S2	8
Total Pegawai		41

Data Kepegawaian per 31 Desember 2025

Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Total Pegawai
1.	III.a	7
2.	III.b	11
3.	III.c	4
4.	III.d	14
5.	IV.a	4
6.	IV.b	1
Total Pegawai		41

Data Kepegawaian per 31 Desember 2025

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Total Pegawai
1.	Pelelang Ahli Madya	2
2.	Pelelang Ahli Muda	4
3.	Pelelang Ahli Pertama	1
4.	Penilai Pemerintah Ahli Muda	2
5.	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	1
6.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
Total Pegawai		11

Data Kepegawaian per 31 Desember 2025

Komposisi Pegawai berdasarkan Generasi

No	Golongan	Total Pegawai
1.	Gen X	17
2.	Gen Y	24
Total Pegawai		41

Data Kepegawaian per 31 Desember 2025

C. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta III memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta III turut berperand dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Jakarta III selaku *asset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Jakarta III senantiasa mendorong Kementerian/Lembaga untuk melakukan 3T dalam pengelolaan BMN, yaitu Tertib Administrasi, Tertib Hukum, dan Tertib Fisik. Terlebih dengan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan BMN, maka DJKN dituntut untuk dapat menjadi *distinguished asset manager*. Hal tersebut berarti sebuah tantangan untuk menjadi *asset manager* yang disegani dan dihormati dalam efektifitas dan produktifitas yang kemudian betul-betul bisa mengelola aset menjadi bermanfaat baik dari sisi ekonomi, sosial dan juga finansial. Pengelolaan BMN didorong agar mampu berperan dalam mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja dan pembiayaan APBN serta penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional.

2. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan – badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada DJKN cq. Panitia

Urusan Piutang Negara. Begitupun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, maka fokus pengurusan piutang negara difokuskan kepada penyerahan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah.

Selain itu, berkaitan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal dari Penyerahan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian atau Seluruhnya Dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan SE-1/KN/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pengurusan Piutang Penyerahan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka sepanjang tahun 2024 KPKNL Jakarta III telah memproses pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara kepada penyerah piutang BUMN/BUMD.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPKNL Jakarta III secara konsisten dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penerimaan negara. Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan biaya yang dipungut oleh PUPN atas layanan pengurusan piutang negara pada saat penanggung utang melakukan angsuran/pelunasan. Selain itu, dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Jakarta III memungut Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

4. Kepatuhan Internal

Unit Kepatuhan Internal merupakan unit khusus pada KPKNL Jakarta III yang berperan dalam pemantauan atas fungsi pengendalian internal. Pada KPKNL Jakarta III memiliki Seksi Kepatuhan Internal yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Oleh karena itu adanya seksi kepatuhan internal sangat berpengaruh dalam mendorong penyelesaian masalah secara cepat dan terbuka dan mengantisipasi kesalahan yang semakin besar dan berulang karena menjadi bagian dari manajemen unit kerja.

5. Hukum dan Informasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPKNL Jakarta III juga menghadapi permasalahan-permasalahan hukum. Dalam upaya penegakan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi lelang atau sita kadang kala harus beririsan dengan kepentingan beberapa pihak yang tidak patuh atau masih berupaya menempuh jalur hukum. Disinilah peran Seksi Hukum dan Informasi yang Seksi Hukum dan Informasi bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum. Selain memberikan pelayanan di bidang hukum, Seksi Hukum dan Informasi berperan dalam perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, terdapat tugas berupa pengawasan terhadap implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat melalui penyusunan berita, pengelolaan media sosial, penyebaran informasi melalui berbagai media grafis, fotografi, maupun videografi.

6. Memberikan Pelayanan Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah inventarisasi dilakukan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian Barang Milik Negara tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Hasil penilaian Barang Milik Negara tersebut antara lain akan digunakan dalam penyesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan dapat digunakan sebagai dasar tersedianya *underlying aset* sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia. Selain itu, penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara. Dengan demikian, pengelolaan kekayaan negara, menjadi optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

7. Memberikan Pelayanan Lelang

Lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum dan terbuka, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang juga dapat dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan.

Lelang mempunyai nilai manfaat lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu antara lain lebih transparan, akuntabel, efisien dan menjamin kepastian hukum. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar masyarakat memandang lelang sebagai suatu alternatif pelaksanaan jual beli yang aman dan menguntungkan.

D. Isu Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tahun 2025, KPKNL Jakarta III mengalami beberapa permasalahan utama, diantaranya:

1. Capaian optimalisasi pengelolaan aset negara cenderung lambat.
2. Terdapat potensi tidak laku untuk barang bergerak dan tidak bergerak khusus untuk Lelang Noneksekusi barang milik lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
3. Upaya pencapaian penurunan nilai saldo piutang negara sangat *challenging*.
4. Upaya mencapai target serifikasi BMN berupa tanah cenderung menantang.
5. Penyelesaian BKPN dengan cara BKPN lunas capaiannya rendah.
6. Penyelesaian beberapa layanan penilaian melewati norma waktu.
7. Menurunnya nilai IKPA pada komponen Belanja Kontraktual bagian Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak.
8. Terdapat potensi tidak laku untuk barang bergerak dan tidak bergerak khusus untuk Lelang Noneksekusi barang milik lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
9. Adanya potensi nilai IKU penanganan permasalahan hukum tidak optimal karena tahapan penanganan yang belum terpenuhi.

Terhadap permasalahan tersebut, tindak lanjut yang telah dilaksanakan KPKNL Jakarta III diantaranya:

1. Menyediakan data akurat dan lengkap pada formulir pendataan dan perhitungan, mendorong satuan kerja melakukan optimalisasi BMN target dan Melakukan penggantian target optimalisasi BMN yang tidak memenuhi kaidah optimalisasi.

2. Memberi edukasi kepada *stakeholder* bahwa untuk mengupdate nilai objek lelang, melaksanakan lelang serentak, melaksanakan penggalian potensi lelang, memetakan potensi lelang, dan melaksanakan lelang AYDA.
3. Menggali data debitur ke dinas catatan sipil dan ditjen AHU, mengupayakan ditemukannya harta kekayaan lain (HKL) dan informasi pendukungnya ke kantor pertanahan dan ditjen AHU, dan melaksanakan lelang ulang.
4. Koordinasi dengan satker, Kanwil DJKN DKI Jakarta, dan Kanwil BPN DKI, Koordinasi dengan satuan kerja yang memiliki target terkait penyelesaian target K2, K3 dan K4.
5. Menggali data debitur ke dinas catatan sipil dan ditjen AHU, melacak data penanggung utang dan ahli warisnya ke instansi terkait kemampuan penanggung utang untuk membayar dan harta kekayaan lain penanggung utang, mengupayakan ditemukannya harta kekayaan lain (HKL) dan informasi pendukungnya ke kantor pertanahan dan ditjen AHU, melaksanakan lelang ulang, penagihan langsung dan pengembalian BKPN.
6. Telah menyampaikan permohonan tambahan pejabat fungsional penilai kepada Kasubbag Umum.
7. Memberi edukasi kepada *stakeholder* bahwa untuk mengupdate nilai objek lelang, melaksanakan penggalian potensi lelang, melaksanakan lelang serentak, dan menyelenggarakan sosialisasi terkait lelang.
8. Mengajukan banding nilai IKPA kepada KPPN Jakarta untuk kemudian diteruskan kepada Direktora Pelaksanaan Anggaran dan terus melakukan *follow up* Nota Dinas banding dengan CSO KPPN Jakarta II.
9. Menyampaikan isu tersebut pada forum pembinaan bantuan hukum dari bidang KIH Kanwil dan tetap melaksanakan penanganan permasalahan hukum dan menunggu arahan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat terkait *cut off* perhitungan capaian Triwulan IV Tahun 2025.

E. Sistematika Laporan

Dalam rangka memudahkan penyajian dan pemahaman terhadap isi laporan, maka laporan ini disusun menggunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Daftar Isi
4. Bab I Pendahuluan
5. Bab II Perencanaan Kinerja

6. Bab III Akuntabilitas Kinerja
7. Bab IV Penutup
8. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan visi tahun 2025–2029, yaitu menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan. Visi ini mencerminkan komitmen DJKN untuk tidak hanya menjaga dan mengelola kekayaan negara, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan tersebut memberikan nilai tambah yang nyata, berkelanjutan, serta mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan visi tersebut, DJKN menetapkan empat misi utama, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum., pemulihan aset, serta mendukung proses penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kementerian Keuangan Satu.

Sejalan dengan misi tersebut, DJKN menetapkan tujuan strategis yang secara substansi merupakan penguatan dan penegasan dari setiap misi. Tujuan DJKN meliputi:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan bagi kepentingan

negara.

3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif guna mendukung layanan prima.

Selanjutnya, tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis DJKN, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal serta mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

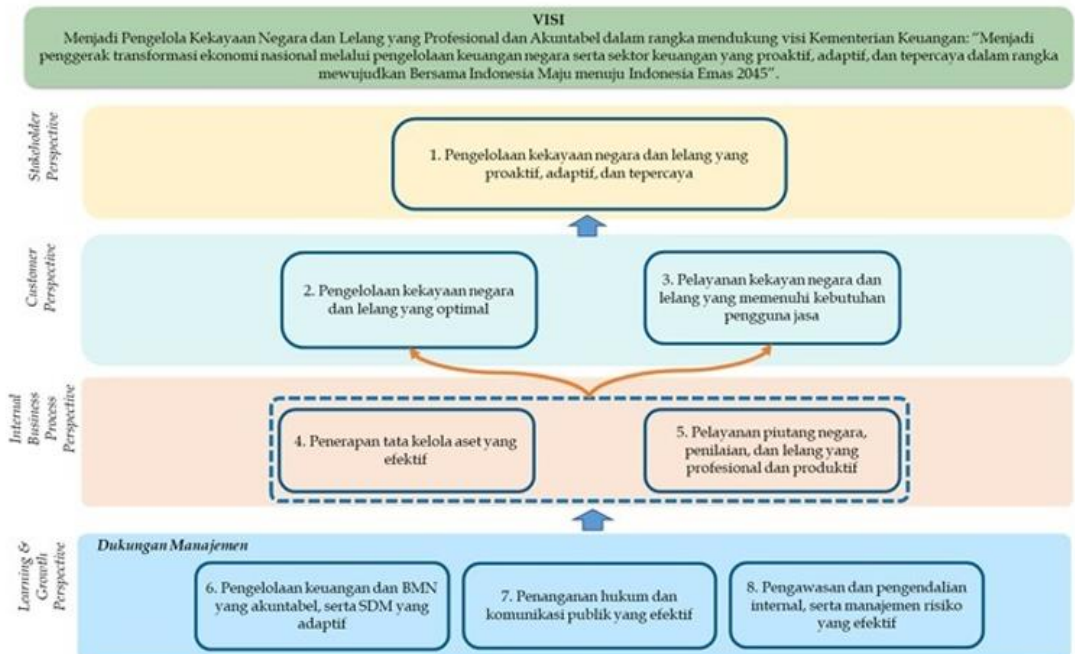
Keseluruhan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut menjadi landasan utama bagi seluruh unit kerja DJKN, termasuk KPKNL Jakarta III, dalam menyusun perencanaan, melaksanakan program dan kegiatan, serta melakukan evaluasi kinerja. Dengan berpedoman pada Renstra DJKN 2025–2029, KPKNL Jakarta III memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa selaras dengan arah kebijakan strategis DJKN dan mendukung pencapaian visi Kementerian Keuangan secara menyeluruh.

Sasaran yang hendak tercapai tersebut, tergambar dalam peta strategi KPKNL Jakarta III Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta III. Peta Strategi KPKNL Jakarta III Tahun 2025 memuat 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. *Stakeholder Perspective*, dengan satu sasaran berupa Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya.
2. *Customer Perspective*, dengan dua sasaran berupa Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal dan Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa.
3. *Internal Process Perspective*, dengan dua sasaran berupa Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif dan Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif.
4. *Learning & Growth Perspective*, dengan tiga sasaran berupa Pengelolaan

Keuangan dan BMN yang Akuntabel,serta SDM yang Adaptif, Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif, dab Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif.

Peta Strategi



Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta III melaksanakan program yaitu:

1. Peningkatan penerimaan negara dari pengelolaan BMN dan lelang (PNBP).
2. Peningkatan penagihan piutang negara secara intensif.
3. Pengelolaan Aset.
4. Melaksanakan percepatan penyelesaian outstanding piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN dan upaya peningkatan kontribusi penerimaan negara terhadap perekonomian sebagai salah satu strategi pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi yaitu dengan memberikan keringanan utang.
5. Optimalisasi Lelang Online dan Permohonan Lelang Online.
6. Peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa dengan berpedoman pada SOP.
7. Optimalisasi Satu Kemenkeu dalam tata persuratan.
8. Sapa Pagi yang dilaksanakan sebagai media pengarahan pimpinan dan rencana kerja setiap pekan bagi pegawai KPKNL Jakarta III.
9. Usulan Pegawai KPKNL Jakarta III untuk mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

B. Penetapan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja KPKNL Jakarta III Nomor PK-3/WKN.07/2025 Tahun 2025 dijabarkan dalam 8 Sasaran Strategis (SS) yang dicapai melalui penetapan 20 target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp90,13 M)
	Indeks integritas	100
	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp894 M)
	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp100 M)
Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%
	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
	Persentase produktivitas lelang	80%
Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95,3%
	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

C. Addendum Perjanjian Kinerja

Selama tahun 2025 tidak terdapat Addendum Perjanjian Kinerja pada KPKNL Jakarta III.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Setelah dilakukan adendum, KPKNL Jakarta III memiliki 8 (delapan) Sasaran Startegis yang dijabarkan ke dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh hasil akhir capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta III sebesar 116,79 (seratus enam belas koma tujuh puluh sembilan), dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 KPKNL Jakarta III

KODE	IKU	V/C	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120
	Stakeholder Perspective (30%)					
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100,00%	133,72%	133,72	120,00
1b-CP	Indeks Integritas	P/L	100,00	105,29	105,29	105,29
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	P/M	100,00%	120,00%	120,00	120,00
	Customer Perspective (20%)					
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	100,00%	121,46%	121,46	120,00
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/L	100,00%	101,19%	101,19	101,19

2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100,00%	100,49%	100,49	100,49
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74,00	117,50	158,78	120,00
Internal Process Perspective (25%)						
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif					
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100,00%	123,57%	123,57	120,00
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	P/M	100,00%	120,00%	120,00	120,00
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	100%	231,33%	231,33	120,00
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70%	109,66%	156,66	120,00
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80,00%	105,30%	131,62	120,00
Learning and Growth Perspective (25%)						
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	P/M	100,00	120,00	120,00	120,00
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100,00	120,00	120,00	120,00
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	80,00%	98,00%	122,50	120,00
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif					
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100,00	117,42	117,42	117,42
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80,00	117,25	146,56	120,00
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif					
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	80,00	99,52	124,40	120,00
8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	P/M	95,30%	110,65%	116,11	116,11

8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	P/M	100,00	135,14	135,14	120,00
NKO					116,79	

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) yang terinci dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian IKU dan kegagalan capaian IKU dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang berhasil dicapai.

Adapun hasil analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya

a. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1a-CP)

Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dibagi menjadi 3 komponen, yaitu PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang.

Nilai Penerimaan Negara yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara, sementara nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. PNBPN Lelang yaitu Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian, bea lelang batal atas permintaan penjual, biaya permohonan lelang, uang jaminan pembeli wanprestasi, dan penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (IKU PNBPN) pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dengan capaian 133,72% atau secara nominal mencapai Rp120,5 Miliar dari targetnya sebesar Rp90,13 Miliar. Seluruh PNBPN baik yang berasal dari transaksi lelang, pengelolaan aset, dan piutang negara berhasil meraih capaian di atas target, dimana capaian tertinggi adalah dari PNBPN yang berasal dari aset dan piutang

negara.

Adapun capaian Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yaitu sebesar Rp120.529.744.053,00 atau 133,72% dari target sebesar Rp90.133.460.000,00. Capaian tersebut berasal dari PNBPN Pengelolaan BMN sebesar Rp81.847.457.459,00, PNBPN Piutang Negara sebesar Rp5.529.687.473,00, dan PNBPN Lelang sebesar Rp33.152.599.121,00.

Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

KPKNL Jakarta III	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	199,42%	122,95%	122,95%	122,25%	122,25%	133,72%	133,72%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam hal penetapan target Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada KPKNL Jakarta III, dalam periode tahun 2020 s.d. 2025 selalu mengalami kenaikan dan capaian yang diperoleh lebih dari 100%. Adapun rinciannya ada pada tabel berikut:

Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2020 s.d. 2025

KPKNL Jakarta III	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target	35.171.824.224 (100%)	43.448.000.000 (100%)	59.812.000.000 (100%)	71.578.086.218 (100%)	84.100.000.000 (100%)	Rp90.133.460.000,00. (100%)
Realisasi	36.019.332.734 (102,41%)	71.253.376.303 (164%)	98.941.607.950 (165,42%)	82.007.149.969 (114,57%)	112.076.861.688 (133,27%)	Rp120.529.744.053,00 9133,72%)
Capaian	102,41%	120%	120%	114,57%	120%	120%

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya mengoptimalkan penerimaan dari pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, memberi edukasi kepada stakeholder bahwa untuk mengupdate nilai objek lelang untuk menghindari potensi tidak laku akibat nilai objek lelang yang sudah tidak relevan dengan nilai objek saat ini, dan melakukan upaya penagihan dengan pemanggilan dan penelitian lapangan.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU tersebut diantaranya melakukan penggalian potensi pemanfaatan BMN dan lelang serta melakukan penelitian dan pemeriksaan piutang lebih lanjut.

b. IKU Indeks Integritas (1b-CP)

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

Pada IKU ini, realisasi KPKNL Jakarta III sebesar 105.29 dari target 100 sehingga indeks integritas mencapai 105.29%.

Capaian IKU Indeks Integritas

KPKNL Jakarta III	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1b-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	100%	100%	100%					
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya (1) Melakukan identifikasi titik rawan (*Risk Profiling*) praktik gratifikasi; (2) *Campaign*/internalisasi pencegahan pelanggaran disiplin di lingkungan DJKN; (3) Pemetaan/identifikasi benturan kepentingan serta monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; (4) Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi pesan/nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh pegawai pada internal unit kerja; (5) Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi dan/atau koordinasi untuk menyampaikan pesan/nilai-nilai antikorupsi kepada pihak eksternal; (6) Internalisasi ketentuan dan kebijakan penggunaan fasilitas kantor terutama kendaraan dinas; (6) Melakukan pemantauan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi; (7)

Pelatihan/internalisasi mengenai mekanisme dan prosedur layanan serta pengelolaan pengaduan; (9) Publikasi infografis layanan sebagai bentuk edukasi/sosialisasi prosedur layanan kepada pengguna layanan; dan (10) Diseminasi kebijakan dan pengelolaan SDM terkait promosi/pola mutasi di lingkungan DJKN.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan Indeks Integritas dapat berupa menjadikan sosialisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, penerapan kode etik ASN yang pengawasan internal dan eksternal yang ketat, dan penerapan sanksi pelanggaran yang sesuai, serta memenuhi dokumen dan pelaksanaan kegiatan pendukung peningkatan integritas.

c. IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan (1c-CP)

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan, dan stakeholders.

Pada tahun 2025, IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK)
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024

Penambahan capaian *extra effort* maksimal 5% dari jumlah unit yang melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) dibanding jumlah unit yang disepakati melakukan FKP (958 unit).

Guna mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan atas standar pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Jakarta III, maka setiap triwulan dilaksanakan pengukuran Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dengan alat ukur berupa kuesioner/survei yang menggambarkan pelayanan secara umum yang telah diberikan oleh KPKNL Jakarta III.

Sebelumnya KPKNL Jakarta III melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna

Layanan (SKPL) secara mandiri, namun mulai triwulan II tahun 2025 Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan penataan mekanisme survei layanan pada seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan melalui e-SKPL

KPKNL Jakarta III pada tahun 2025 memperoleh capaian IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan sebesar 120% dari target sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut.

Capaian IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.							
	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	27,78%	83,33%	83,33%	100%	100%	112,19%	112,19%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	112%	112%	

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya penyampaian laporan berkala mengenai tindak lanjut pengelolaan saluran pengaduan yang dilaporkan oleh pengelola pengaduan kepada pimpinan unit; penyampaian laporan hasil survei Kepuasan Penggunal Layanan secara periodik dan penyampaian link Survei Kepuasan Pengguna Layanan.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan stakeholder dan pengguna layanan dimaksud, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi serta responsif atas pengaduan/keluhan dari pengguna jasa dengan tetap mengacu pada peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku.

2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

a. IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara (2a-CP)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan.

Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Target IKU ini pada tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 121,46% dengan capaian 120% dengan rincian sebagai berikut:

Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

KPKNL Jakarta III	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/KP
Target	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	111,54%	122,02%	122,02%	125,54%	125,54%	121,46%	121,46%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya menyediakan data akurat dan lengkap pada formulir pendataan & perhitungan; mendorong satuan kerja melakukan optimalisasi BMN target; dan melakukan penggantian target optimalisasi BMN yang tidak memenuhi kaidah optimalisasi.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini diantaranya Menyediakan data akurat dan lengkap pada formulir pendataan & perhitungan; Mendorong satuan kerja melakukan optimalisasi BMN target; Melakukan penghapusan target optimalisasi BMN yang telah mengalami perubahan kodefikasi & bersengketa.

b. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang (2b-CP)

Lelang memiliki peranan dalam perekonomian nasional yaitu :

- 1) Pengelolaan Keuangan Negara melalui penjualan BMN/D, barang milik desa, barang milik BUMN/D, perorangan, aset harta pailit, barang temuan, aset dari tegahan Bea dan Cukai, aset bank dalam likuidasi, dan sebagainya.
- 2) Penegakan Hukum melalui berbagai jenis lelang eksekusi. Seperti Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi UUHT, Lelang Eksekusi Pengadilan, Rampasan Kejaksaan, Sitaan KPK, Gadai, Lelang PT Pegadaian, dan sebagainya.
- 3) Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di bidang lelang antara lain sebagai Pejabat Lelang Swasta (Kelas II), para pegawai Kantor PL II, mendukung penjualan barang UMKM, mendukung penjualan hasil hutan, dan sebagainya.

Dari pelaksanaan lelang yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, didapatkan hasil lelang yang direpresentasikan oleh Pokok Lelang dan PNPB Lelang. Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Capaian untuk IKU Persentase realisasi pokok lelang tahun 2025 berhasil melebihi target yang ditetapkan. Secara nominal realisasi pokok lelang tercatat sebesar Rp904.666.839.808,00 yang berasal dari pokok lelang PL I sebesar Rp797.767.603.908,00 dan pokok lelang PL Pegadaian sebesar Rp106.899.235.900,00 atau mencapai 101,19% dibandingkan targetnya sebesar 894.000.000.000,00 yang berasal dari pokok lelang PL I sebesar Rp 759.900.000.000,00 dan pokok lelang PL Pegadaian sebesar Rp134.100.000.000,00. Capaian ini diraih melalui upaya penggalan serta pemetaan potensi serta lelang AYDA.

Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

KPKNL Jakarta III	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	429,64%	124,15%	124,15%	102,80%	102,80%	100,64%	100,64%	
Capaian	120%	120%	120%	102,80%	102,80%	100,64%	100,64%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya memberi edukasi kepada *stakeholder* untuk mengupdate nilai objek lelang, melaksanakan lelang serentak, penggalan potensi lelang, dan melaksanakan lelang AYDA.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini diantaranya mempercepat pelayanan permohonan lelang melalui lelang.go.id, berperan serta aktif dalam memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan lelang kepada masyarakat luas serta melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait objek lelang yang memiliki potensi laku terjual

c. IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara (2c-CP)

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDP/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat); dan
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL.

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari :

1. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap); dan
3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

KPKNL Jakarta III pada tahun 2025 memiliki target sebesar Rp100.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp100.492.130.080,73

Capaian Persentase Realisasi Penurunan Saldo Piutang Negara

KPKNL Jakarta III	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	27,63%	23,33%	23,33%	92,62%	92,62%	100,49%	100,49%	
Capaian	27,63%	23,33%	23,33%	92,62%	92,62%	100,49%	100,49%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya menggali data debitur ke dinas catatan sipil dan ditjen AHU, mengupayakan ditemukannya harta kekayaan lain (HKL) dan informasi pendukungnya ke kantor pertanahan dan ditjen AHU serta melaksanakan lelang ulang.

Action plan dalam mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu menyampaikan surat paksa dan penagihan secara langsung kepada penanggung hutang, serta melakukan optimalisasi pengurusan piutang negara, menggali data debitur ke dinas catatan sipil dan ditjen AHU, mengupayakan ditemukannya harta kekayaan lain (HKL) dan informasi pendukungnya ke kantor pertanahan dan ditjen AHU dan melaksanakan lelang ulang.

3. Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

a. IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi (3a-CP)

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

Pada tahun 2025 KPKNL Jakarta III memiliki target sebesar 74 dengan realisasi sebesar 117,50, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 120.

Capaian Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

KPKNL Jakarta III	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	100	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	110	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya yaitu melaksanakan edukasi dan komunikasi kepada para stakeholder.

Action plan dalam mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu menyampaikan materi/rencana pelaksanaan edukasi Triwulan I/2026 kepada Kanwil c.q. Bidang Lelang dan Bidang Piutang Negara.

4. Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

a. IKU Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan (4a-CP)

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang clean and clear (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang not clean but clear (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang not clean and not clear (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama

Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. disamping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.

IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan mencapai 123,57%. Pada periode ini tercapai 4.131 bidang tanah yang disertipikatkan dari targetnya di tahun 2025 sebanyak 3.343 bidang tanah.

Capaian Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan

KPKNL Jakarta III	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan.							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	6,49%	53,16%	53,16%	73,89%	73,89%	123,57%	123,57%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya yaitu melakukan koordinasi dengan satker, Kanwil DJKN DKI Jakarta, dan Kanwil BPN DKI, Koordinasi dengan satuan kerja yang memiliki target terkait penyelesaian target K2, K3 dan K4.

Action plan dalam mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu menjalin kerjasama yang solid dengan satker dan kantar guna mempercepat proses penyetipikatan dan mengadakan rapat triwulanan yang dihadiri Kanwil BPN, Kantah, Kanwil DJKN, KPKNL serta Satker Pemohon untuk membahas kendala dan solusi.

b. IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (4b-CP)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak

lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalu Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

Capaian untuk tindak lanjut bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan komitmen penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan atau persetujuan pengelola barang. Jika direkomendasikan untuk diserahkan kepada Pengelola Barang, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan Pengguna Barang.

Persentase evaluasi kinerja BMN mencapai 120%. Capaian ini jauh melebihi target pada Tahun 2025 sebesar 100%.

Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Nama Unit	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	17%	44%	44%	92%	92%	173%	173%	
Capaian	120%	120%	120%	115%	115%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya memetakan daftar aset yang belum dilakukan evaluasi kinerja, melakukan survey lapangan maupun desk valuation evaluasi kinerja aset, melakukan perhitungan evaluasi kinerja BMN melalui aplikasi SIMAN 2, dan menyampaikan hasil perhitungan kinerja BMN kepada satker.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu tetap terus berkoordinasi dengan satuan kerja dan melaksanakan survei lapangan terhadap BMN yang belum dilakukan survei.

5. Sasaran Strategis 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

a. IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (5a-CP)

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016 jls. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa:

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara
 - a. Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - b. Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara
 - a. Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - b. Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal
 - a. Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan

Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);

- b. Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN.

Target di 2025 sejumlah 250 Berkas Piutang Negara Diselesaikan berasal dari Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara dan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara. target pada Tahun 2025 sebesar 100%.

Capaian untuk Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara tercapai pada tahun 2025 berhasil melampaui jauh targetnya dengan capaian sebesar 231,33% dimana dari 400 berkas yang ditargetkan penyelesaiannya, telah diselesaikan sebanyak 925 berkas.

Capaian IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

KPKNL Jakarta III	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoIKP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	117,20%	123,65%	123,65%	117,87%	117,87%	231,33%	231,33%	
Capaian	117,20%	120%	120%	117,87%	117,87%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya menggali data debitur ke dinas catatan sipil dan ditjen AHU, melacak data penanggung utang dan ahli warisnya ke instansi terkait kemampuan penanggung utang untuk membayar dan harta kekayaan lain penanggung utang, dan mengupayakan ditemukannya harta kekayaan lain (HKL) dan informasi pendukungnya ke kantor pertanahan dan ditjen AHU.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu melanjutkan upaya menggali data debitur ke dinas catatan sipil dan ditjen AHU, melacak data penanggung utang dan ahli warisnya ke instansi terkait kemampuan penanggung utang untuk membayar dan harta kekayaan lain penanggung utang, mengupayakan ditemukannya harta kekayaan lain

(HKL) dan informasi pendukungnya ke kantor pertanahan dan ditjen AHU, dan melaksanakan lelang ulang.

b. IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian (5b-CP)

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

Capaian IKU Tingkat kualitas layanan penilaian pada Tahun 2025 sebesar 109,66% dari targetnya sebesar 80%, sehingga capaian IKU mencapai 120%.

Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

KPKNL Jakarta III	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	S.M. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/IKP
Target	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	109,93%	171,43%	171,43%	115,37%	115,37%	104,22%	109,66%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya telah menyampaikan permohonan tambahan pejabat fungsional penilai kepada Kasubbag Umum.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu melaksanakan layanan penilaian sesuai norma waktu dan monitoring hasil kaji ulang laporan yang dilakukan oleh Kanwil.

c. IKU Persentase Produktivitas Lelang (5c-CP)

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi

perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Sejalan dengan capaian pokok lelang yang mencapai target, IKU Persentase produktivitas lelang juga mencapai target. Pada periode Triwulan IV/2025 ini dari target 80%, dapat dicapai produksi lelang sebesar 105,30%.

Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang

KPKNL Jakarta III	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PolIKP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	
Realisasi	177,38%	69,19%	69,19%	91,02%	91,02%	105,30%	105,30%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya memberi edukasi kepada *stakeholder* bahwa untuk mengupdate nilai objek lelang, melaksanakan penggalan potensi lelang, melaksanakan lelang serentak dan rutin dan menyelenggarakan sosialisasi terkait lelang.

Action plan yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan IKU ini yaitu mempercepat pelayanan permohonan lelang melalui lelang.go.id, edukasi terhadap pengguna jasa, penggalan potensi lelang, melaksanakan lelang serentak dan rutin, serta menyebarluaskan informasi lelang melalui media sosial resmi KPKNL Jakarta III.

6. Sasaran Strategis 6: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Produktif

a. IKU Tingkat Kualitas Kinerja Anggaran (6a-CP)

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun 2024 pasal 249 ayat (7) .

Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

IKU Indeks kualitas kinerja anggaran pada tahun 2025 tercapai realisasi sebesar 120%.

Capaian Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

KPKNL Jakarta III	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	6a-CP Tingkat kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoM/KP
Target	100%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
Realisasi	120%	103,47%	103,47%	102%	102%	120%	120%	
Capaian	100%	120%	120%	102%	102%	120%	120%	

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Jakarta III dengan status capaian hijau dikarenakan penyerapan anggaran yang optimal. Tindakan yang telah dilaksanakan adalah dengan memberikan himbauan ke seluruh seksi/subbagian umum serta bidang tugas yang ada untuk segera melakukan kegiatan yang dalam rangka penyerapan anggaran maupun pencapaian output, serta mengajukan banding nilai IKPA kepada KPPN Jakarta untuk kemudian diteruskan kepada Direktora Pelaksanaan Anggaran.

Action plan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan koordinasi antara subbag umum dengan seluruh seksi dan fungsional dalam hal identifikasi kegiatan yang perlu dilakukan dan penyusunan RPD secara tepat.

b. IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (6b-CP)

IKU ini mengukur komponen berikut:

- a. Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri)
- b. Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

IKU Indeks pengadaan barang dan jasa pada tahun 2025 ini tercapai 120%.

Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

KPKNL Jakarta III	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	6a-CP Tingkat kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
Realisasi	120%	103,47%	103,47%	102%	102%	120%	120%	
Capaian	100%	120%	120%	102%	102%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya selalu melakukan pengecekan angka TKDN atas barang yang akan dibeli, mencari alternatif barang lain atau merk lain apabila barang yang akan diadakan memiliki TKDN di bawah 50%, dan memilih menggunakan produk milik BUMN seperti melakukan pembelian BBM pada SPBU Pertamina.

Action plan yang dilaksanakan adalah memastikan selalu memilih produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, dan memastikan selalu memilih produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

c. IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (6c-CP)

KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan sebagai IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai. IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat.

KPKNL Jakarta III sangat fokus mendorong pegawainya untuk terus melakukan pengembangan diri melalui diklat, workshop, loka karya, webinar maupun melanjutkan pendidikan. Hal ini agar seluruh pegawai KPKNL Jakarta III dapat memberikan layanan yang terbaik kepada Pengguna Jasa dengan sikap yang sesuai dengan salah satu Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu aspek Profesionalisme.

IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai target pada tahun 2025 tercapai 93,20% dari targetnya sebesar 80% dengan terpenuhinya

kegiatan pemenuhan jamlat pegawai, pelaksanaan sharing session bintal Kejiwaan, pelaksanaan sharing session sinergi antargenerasi (narasumber kepala kantor dan agen perubahan), penyampaian rekomendasi pelatihan yang dapat diikuti kepada pegawai yang masih belum memenuhi jamlat pelatihan, serta pelaksanaan survei untuk memperoleh feedback pegawai atas pelaksanaan bintal.

Capaian Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

KPKNL Jakarta III	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	6c-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoWKP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	70%	70%	
Realisasi	30%	65%	65%	81%	81%	93,20%	93,20%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	116,50%	116,50%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya dengan monitoring kegiatan pemenuhan jamlat pegawai, pelaksanaan sharing session bintal Kejiwaan, pelaksanaan sharing session sinergi antargenerasi, penyampaian rekomendasi pelatihan yang dapat diikuti kepada pegawai yang masih belum memenuhi jamlat pelatihan, serta pelaksanaan survei untuk memperoleh feedback pegawai atas pelaksanaan bintal.

Action plan atas IKU ini diantaranya dengan selalu update memberikan informasi pelatihan pada pegawai dan selalu mendorong pegawai KPKNL Jakarta III untuk mengikuti pelatihan klasikan maupun non klasikal.

7. Sasaran Strategis 7: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

a. IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum (7a-CP)

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%)
- b. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%).

Realisasi atas IKU Indeks penanganan permasalahan hukum pada Tahun 2025 mencapai 117,42 dari targetnya sebesar 100.

Capaian Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

KPKNL Jakarta III	Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif							Pol/KP
	7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	114,97	114,36	114,36	113,95%	113,95%	117,42%	117,42%	
Capaian	114,97	114,36	114,36	113,95%	113,95%	117,42%	117,42%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya menyampaikan isu adanya potensi nilai IKU penanganan permasalahan hukum tidak optimal karena tahapan penanganan yang belum terpenuhi pada forum pembinaan bantuan hukum dari bidang KIH Kanwil, dan tetap melaksanakan penanganan permasalahan hukum dan menunggu arahan Dit. Hukum dan Hubungan Masyarakat terkait cut off perhitungan capaian Triwulan IV/2025.

Action plan yang dilaksanakan adalah dengan mengusulkan tambahan pegawai yang berlatar belakang bidang hukum.

b. IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) (7b-CP)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022.

Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di

atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Realisasi Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) untuk pada periode Triwulan IV/2025 mencapai 117,25 dari targetnya sebesar 80, sehingga capaian IKU menjadi 120%.

Capaian Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

KPKNL Jakarta III	Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif							
	7b-CP Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	118	116	116	112,06	112,06	116%	117,25%	
Capaian	118	120	120	120	120	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya merespon permohonan informasi publik yang ada sesuai norma waktu berlaku, segera mengupdate informasi publik pada website DJKN sesuai dengan panduan Direktorat Hukum dan Humas, serta menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik kepada pelaksanan PPID di atasnya tepat waktu.

Action plan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IKU ini yaitu melakukan upaya *extra effort* yang telah dilakukan tahun sebelumnya dan menindaklanjuti kegiatan-kegiatan mandatory sesuai arahan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

8. Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian Internal serta Manajemen Risiko yang Efektif

a. IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko (8a-N)

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen

risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Realisasi Indeks Manajemen dan Risiko sudah berjalan *on the track* dengan mencapai indeks 92,13 dari targetnya 80 sehingga capaian IKU menjadi sebesar 115,16%.

Capaian Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

KPKNL Jakarta III	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoIKP
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	100	89,79	89,79	99,72%	99,72%	92,13%	92,13%	
Capaian	120	120	120	120	120	115,16%	115,16%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya melaksanakan sosialisasi manajemen kinerja dan risiko, keikutsertaan dalam e-learning manajemen risiko dan kinerja, dan pelaksanaan DKO manajemen risiko dan kinerja.

Action plan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini diantaranya dengan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko, penyusunan SK Tim Manajemen dan Risiko, Penyusunan SK Tim Manajemen dan Risiko, penyusunan Profil Risiko Tahun 2026, dan pembahasan manajemen kinerja dan risiko secara berkala yang diikuti oleh seluruh pegawai KPKNL Jakarta III.

b. IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (8b-N)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa Rekomendasi *Policy*

Recommendation, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain *Policy Recommendation*.

IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti mencapai 110,65% dari targetnya sebesar 100% dengan telah diselesaikannya 3 rekomendasi hasil pengawasan Itjen terkait Seksi Piutang Negara dan saat ini sudah berstatus tuntas.

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

KPKNL Jakarta III	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-245	Pol/KP
Target	75,50%	82,50%	82,50%	100	100	100	100	
Realisasi	80%	100%	100%	144,75%	144,75%	110,65%	110,65%	
Capaian	105,96%	120%	120%	120%	120%	116,11%	116,11%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 yaitu menyelesaikan 3 temuan/rekomendasi hasil pengawasan itjen. Adapun saat ini status pemenuhan rekomendasi adalah “tuntas”.

Action plan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu Monitoring temuan yang terbit dan melaksanakan pemenuhan rekomendasi.

c. IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan

Kementerian Keuangan.

Capaian IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM sesuai target yaitu 135,14 dengan terpenuhinya kegiatan/dokumen kriteria ZI-WBK serta pelaksanaan *field evaluation*.

**Capaian Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan
Pembangunan ZI WBK/WBBM**

KPKNL Jakarta III	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8e-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-245	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	100	100	100	100	135,14%	135,14%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 yaitu pelaksanaan *field evaluation* dan pemenuhan dokumen pendukung.

IKU ini merupakan IKU yang tidak muncul setiap tahun, tergantung dengan tingkatan masing-masing KPKNL dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM.

B. Kinerja Lainnya

1. Inovasi Kuitansi Lelang Online

Inovasi Kuitansi Lelang Online untuk pelaksanaan lelang sebelum tahun 2025 yang diinisiasi oleh Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta III, Andru Ryvano Abrir. Dengan inovasi ini, Pemenang Lelang tidak perlu datang ke APT KPKNL Jakarta III untuk bermohon kuitansi lelang, cukup dengan mengisi link <https://s.id/KuitansiJakarta3> dan melengkapi data yang diperlukan, Pemenang Lelang dapat mendapatkan kuitansi online secara efektif dan efisien.

2. Lelang Hakordia 2025 Sukses

KPKNL Jakarta III bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sukses menyelenggarakan Lelang Hakordia Tahun 2024 pada Selasa, 9 Desember 2025 bertempat di Gedung Juang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Dari 78 lot yang ditawarkan KPKNL Jakarta III, sebanyak 61 lot berhasil terjual dengan nilai capaian mencapai Rp8,6 miliar. Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi aktif KPKNL Jakarta III dalam mendukung upaya pemulihan aset (*asset recovery*) dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Selain lelang Hakordia, KPKNL Jakarta III bersama KPK rutin menyelenggarakan lelang serentak barang rampasan KPK yang dilaksanakan secara triwulanan.

3. Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) KPKNL Jakarta III

Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) KPKNL Jakarta III mengadakan kegiatan Pembinaan mental (Bintal Kejiwaan). Kegiatan Bintal di lingkungan KPKNL Jakarta III Tahun 2025 mencakup bidang kejiwaan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kesehatan dan ketahanan fisik dan mental yang optimal melalui pendekatan aspek kejiwaan (psikolog). Tema yang diangkat yaitu "Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental di Tempat Kerja".

C. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025 KPKNL Jakarta III mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Alokasi anggaran tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPKNL Jakarta III Tahun 2025. Adapun keseluruhan anggaran yang tersedia setelah revisi dari blokir dan efisiensi berjumlah Rp3.325.920.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.180.346.840,00 atau sebesar 95,62%, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran KPKNL Jakarta III				
Tahun 2025				
No	Program	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai			
2	Belanja Barang	2.874.513.000,00	2.735.905.122,00	95,18
3	Belanja Modal	451.407.000,00	444.441.718,00	98,46
TOTAL		Rp3.325.920.000,00	Rp. 3.180.346.840,00	95,62

Meskipun anggaran tidak terserap 100% tetapi terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-Three KPKNL Jakarta III Tahun 2025 telah memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta III yaitu sebesar 116,79%. Adapun penyerapan anggaran tahun 2025 pada KPKNL Jakarta III dipengaruhi oleh beberapa kondisi, antara lain:

a. Belanja Pegawai

Pagu anggaran belanja pegawai TA 2025 pada KPKNL Jakarta III sebesar Rp0, hal tersebut dikarenakan adanya sentralisasi belanja pegawai sesuai Perdirjen KN Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai untuk Pegawai Lingkup DJKN.

b. Belanja Barang

Persentase realisasi belanja barang TA 2025 sebesar 95,18% atau sebesar Rp2.735.905.122,00 dari pagu anggaran sebesar Rp2.874.513.000,00.

c. Belanja Modal

Persentase realisasi belanja modal TA 2025 sebesar 98,46% atau sebesar Rp444.441.718,00 dari pagu anggaran sebesar Rp451.407.000,00.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Jakarta III sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintahan. Penyusunan laporan dilakukan untuk mengetahui kinerja organisasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis tahun 2025, pencapaian kinerja atas target yang ditetapkan pada KPKNL Jakarta III seluruhnya tercapai dengan hasil yang optimal dan indikator capaian hijau, sehingga di tahun 2025 ini, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta III berhasil tercapai sebesar 116,79%.

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Laporan Kinerja 2025 memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Jakarta III mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran pengguna barang akan pentingnya pengelolaan kekayaan yang tertib secara administrasi, fisik dan hukum melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara pada pengguna barang.
2. Meningkatkan koordinasi dengan kantor pertanahan dan satuan kerja penatausahaan bidang tanah dalam program pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2026.
3. Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan lelang dan mendorong persepsi positif bahwa lelang merupakan alternatif pelaksanaan jual beli yang mudah, aman, efisien dan menguntungkan.

4. Melaksanakan rekonsiliasi data utang dengan penyerah piutang dalam rangka peningkatan kualitas data saldo piutang yang akurat.
5. Mendorong percepatan penyelesaian piutang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melaksanakan surat paksa, memberikan keringanan hutang dan lelang barang jaminan.
6. Pemantauan terhadap keakuratan data pada aplikasi penunjang seperti SIMAN, SIBANKUM, Fokus PN dan Sistem Informasi Penilaian.
7. Berkoordinasi secara intensif dengan pihak Perbankan dan Balai Lelang terkait pengajuan berkas permohonan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan untuk meningkatkan potensi lelang laku.
8. Mengedukasi Pemohon Lelang tentang Tata Cara Permohonan Lelang guna meminimalisasi permasalahan hukum sebelum dan paska lelang.
9. Meningkatkan komunikasi dengan para pengguna layanan, menerima kritik dan masukan melalui kuisisioner dalam upaya peningkatan layanan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi KPKNL yang berbasis pada kebutuhan pengguna layanan.
10. Mendorong pegawai untuk membuat inovasi guna menghasilkan output pekerjaan yang lebih cepat, akurat, dan efisien.
11. Mendorong pengembangan kompetensi pegawai melalui program pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan, dan analisis beban kerja dalam rangka peningkatan kualitas layanan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas.
12. Mewujudkan Keberlangsungan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Tahun 2026.
13. Berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang Santun, Tertib, Amanah dan Responsif (STAR) sebagai wujud implementasi secara nyata Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) untuk mendukung pencapaian Indonesia Maju.



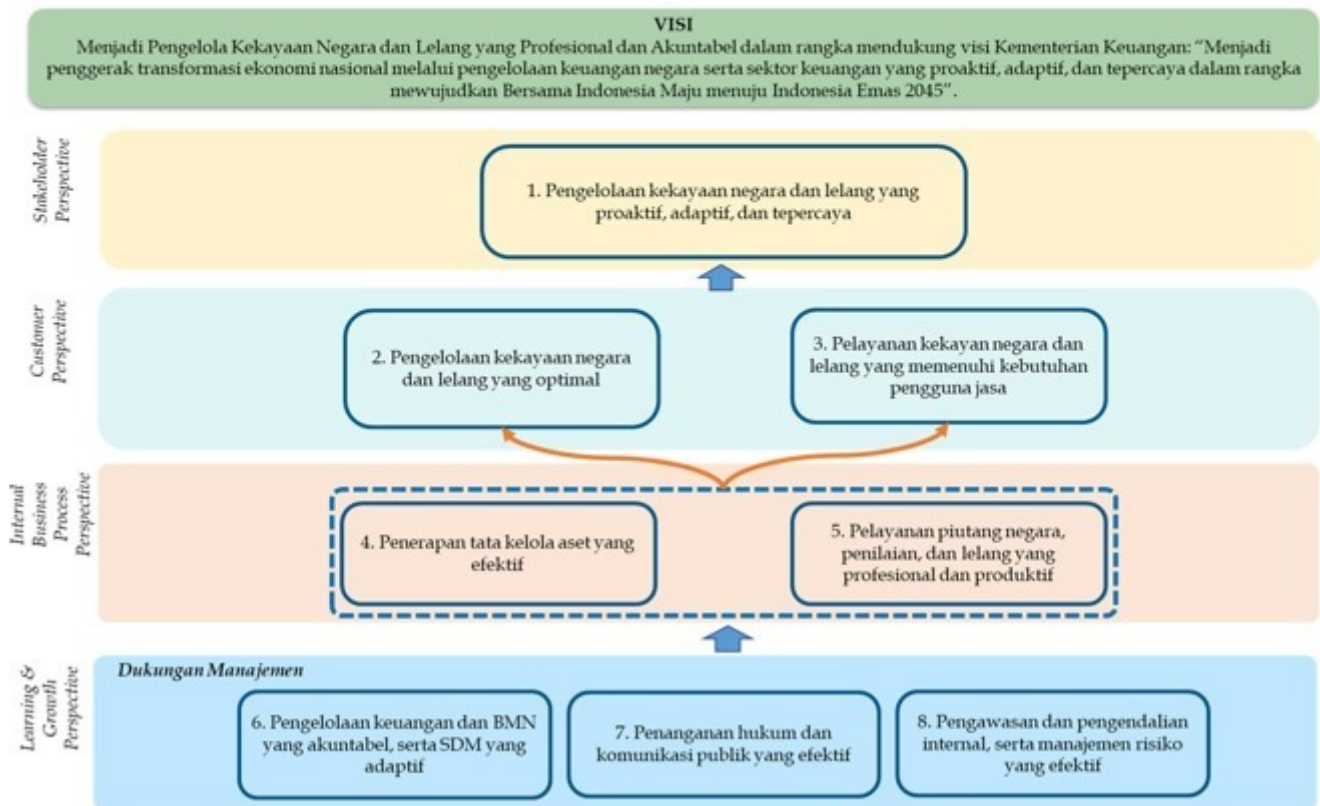
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-3/WKN.07/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA III
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA III
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp90,13 M)
		1b-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp894 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp100 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%
		8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-	100



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		WBK/WBBM	

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Rp1,884,648,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

Rp52,580,000

2. Pengelolaan Aset

Rp1,832,068,000

Program:

Dukungan Manajemen

Rp1,968,282,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi

Rp62,992,000

2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Rp1,862,158,000

3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

Rp22,088,000

4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal

Rp21,044,000

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara DKI Jakarta

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta III



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono



Ditandatangani Secara Elektronik
Rina Yulia



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA III
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp90,13 M)
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp894 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp100 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta III



Ditandatangani Secara Elektronik
Rina Yulia



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta III



Ditandatangani Secara Elektronik
Rina Yulia



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Rina Yulia		NAMA	Arif Bintarto Yuwono
NIP	19700104 199603 2 001		NIP	19710912 199703 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta III		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta III		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp90,13 M)	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp894 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp100 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik

Arif Bintarto Yuwono
19710912 199703 1 001



Ditandatangani secara elektronik

Rina Yulia
19700104 199603 2 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	40 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp90,13 M)
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp894 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp100 M)



3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%



	8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									

Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Arif Bintarto Yuwono
19710912 199703 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Rina Yulia
19700104 199603 2 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL JAKARTA III
Periode s.d Triwulan IV 2025

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target s.d	Realisasi s.d.	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective	
				Triwulan IV	Triwulan IV							
Stakeholder Perspective (30%)												
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	-									114.05	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100.00%	133.72%	14.00%	29.79%	133.72	120.00	35.74	114.05	
1b-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100.00	105.29	19.00%	40.43%	105.29	105.29	42.56		
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	Max	P/M	100.00%	120.00%	14.00%	29.79%	120.00	120.00	35.74		
Customer Perspective (20%)												
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-									107.88	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100.00%	121.46%	19.00%	36.54%	121.46	120.00	43.85	113.94	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100.00%	101.19%	19.00%	36.54%	101.19	101.19	36.97		
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100.00%	100.49%	14.00%	26.92%	100.49	100.49	27.06		
Internal Process Perspective (25%)												
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-									120.00	
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74.00	117.50	14.00%	100.00%	158.78	120.00	120.00	120.00	
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-										120.00
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100.00%	123.57%	14.00%	50.00%	123.57	120.00	60.00		
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100.00%	120.00%	14.00%	50.00%	120.00	120.00	60.00		
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	-									120.00	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	231.33%	14.00%	33.33%	231.33	120.00	40.00	120.00	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	109.66%	14.00%	33.33%	156.66	120.00	40.00		
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80.00%	105.30%	14.00%	33.33%	131.62	120.00	40.00		
Learning and Growth Perspective (25%)												
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-									120.00	
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100.00	120.00	14.00%	33.33%	120.00	120.00	40.00	119.14	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100.00	120.00	14.00%	33.33%	120.00	120.00	40.00		
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80.00%	98.00%	14.00%	33.33%	122.50	120.00	40.00		
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-										118.71
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100.00	117.42	14.00%	50.00%	117.42	117.42	58.71	119.14	
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80.00	117.25	14.00%	50.00%	146.56	120.00	60.00		
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-									118.70	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80.00	99.52	14.00%	33.33%	124.40	120.00	40.00	118.70	
8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Max	P/M	95.30%	110.65%	14.00%	33.33%	116.11	116.11	38.70		
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	Max	P/M	100.00	135.14	14.00%	33.33%	135.14	120.00	40.00		
NKO											116.79	

*)

*)

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537916 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III**

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	3,325,920,000	0	2,648,077,911	532,718,929	3,180,796,840	95.64 %	145,123,160
CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	1,421,671,000	0	1,124,587,931	238,426,521	1,363,014,452	95.87 %	58,656,548
CD.4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	39,700,000	0	30,324,100	8,819,328	39,143,428	98.60 %	556,572
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	39,700,000	0	30,324,100	8,819,328	39,143,428	98.60 %	556,572
AEF.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	30,269,000	0	22,949,100	7,202,000	30,151,100	99.61 %	117,900
AEF.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	4,050,000	0	3,770,000	0	3,770,000	93.09 %	280,000
AEF.003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	5,381,000	0	3,605,000	1,617,328	5,222,328	97.05 %	158,672
CD.4798 Pengelolaan Aset	1,381,971,000	0	1,094,263,831	229,607,193	1,323,871,024	95.80 %	58,099,976
AAH Peraturan lainnya	490,141,000	0	348,385,699	120,260,250	468,645,949	95.61 %	21,495,051
AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	285,257,000	0	181,464,754	98,371,040	279,835,794	98.10 %	5,421,206
AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	204,884,000	0	166,920,945	21,889,210	188,810,155	92.15 %	16,073,845
ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	15,175,000	0	13,544,100	0	13,544,100	89.25 %	1,630,900
ABA.002 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	15,175,000	0	13,544,100	0	13,544,100	89.25 %	1,630,900
BAH Pelayanan Publik Lainnya	19,664,000	0	17,852,000	1,096,000	18,948,000	96.36 %	716,000
BAH.001 Risalah Lelang	19,664,000	0	17,852,000	1,096,000	18,948,000	96.36 %	716,000
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	56,280,000	0	17,062,000	20,016,180	37,078,180	65.88 %	19,201,820
FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	28,100,000	0	5,950,000	17,489,180	23,439,180	83.41 %	4,660,820
FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian	23,490,000	0	10,020,000	0	10,020,000	42.66 %	13,470,000
FAE.007 Penggalian Potensi Lelang	4,690,000	0	1,092,000	2,527,000	3,619,000	77.16 %	1,071,000
FAK Pengelolaan Aset BUN	783,262,000	0	681,451,392	88,234,763	769,686,155	98.27 %	13,575,845
FAK.001 Aset BUN yang Dikelola	783,262,000	0	681,451,392	88,234,763	769,686,155	98.27 %	13,575,845
UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	17,449,000	0	15,968,640	0	15,968,640	91.52 %	1,480,360
UAE.201 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	17,449,000	0	15,968,640	0	15,968,640	91.52 %	1,480,360
WA Program Dukungan Manajemen	1,904,249,000	0	1,523,489,980	294,292,408	1,817,782,388	95.46 %	86,466,612
WA.4700 Legislasi dan Litigasi	61,352,000	0	48,666,250	12,297,000	60,963,250	99.37 %	388,750
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	61,352,000	0	48,666,250	12,297,000	60,963,250	99.37 %	388,750

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537916 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III**

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	61,352,000	0	48,666,250	12,297,000	60,963,250	99.37 %	388,750
WA.4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1,814,881,000	0	1,462,246,130	272,595,408	1,734,841,538	95.59 %	80,039,462
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,363,474,000	0	1,017,804,412	272,595,408	1,290,399,820	94.64 %	73,074,180
EBA.002 Kerumahtangaan	39,406,000	0	25,458,128	4,011,000	29,469,128	74.78 %	9,936,872
EBA.994 Layanan Perkantoran	1,324,068,000	0	992,346,284	268,584,408	1,260,930,692	95.23 %	63,137,308
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	451,407,000	0	444,441,718	0	444,441,718	98.46 %	6,965,282
EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran	52,607,000	0	51,941,718	0	51,941,718	98.74 %	665,282
EBB.003 Kendaraan Bermotor	398,800,000	0	392,500,000	0	392,500,000	98.42 %	6,300,000
WA.4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	17,494,000	0	7,549,000	9,060,000	16,609,000	94.94 %	885,000
BMB Komunikasi Publik	17,494,000	0	7,549,000	9,060,000	16,609,000	94.94 %	885,000
BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik	13,920,000	0	5,464,000	7,870,000	13,334,000	95.79 %	586,000
BMB.002 Kehumasan	3,574,000	0	2,085,000	1,190,000	3,275,000	91.63 %	299,000
WA.4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	10,522,000	0	5,028,600	340,000	5,368,600	51.02 %	5,153,400
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,522,000	0	5,028,600	340,000	5,368,600	51.02 %	5,153,400
EBD.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	10,522,000	0	5,028,600	340,000	5,368,600	51.02 %	5,153,400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



DJKN

KPKNL
JAKARTA III

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



KPKNL JAKARTA III

KPKNL Jakarta III STAR

Santun, Tertib, Amanah, Responsif

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Berpedoman pada peraturan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan organisasi yang tertuang dalam sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, telah mendorong DJKN untuk menerapkan sistem *Balance Scorecard Card (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. Kinerja KPKNL Jakarta III dinilai berdasarkan IKU yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Jakarta III Tahun 2025.

Laporan capaian kinerja tahun 2025 KPKNL Jakarta III menyajikan hasil pencapaian terhadap 8 (delapan) Sasaran Strategis Kemenkeu *Three* KPKNL dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, yang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 sebesar 116,79%. Hasil capaian tersebut tentunya menjadi motivasi bagi kami untuk semakin lebih baik lagi di tahun berikutnya.

Dengan slogan “Santun, Tertib, Amanah, Responsif (STAR)” dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, serta budaya kerja sesuai Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan dan bermanfaat bagi pengguna jasa.

Umpan balik berupa kritik dan saran yang membangun dari para pengguna jasa sangat dibutuhkan sebagai bahan refleksi bagi kami untuk terus berbenah dalam memberikan layanan yang prima.

Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik
Rina Yulia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III dalam mengelola kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan penilaian, dan pelayanan lelang disampaikan kepada *stakeholders* melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Jakarta III Tahun 2025. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis, LAKIN KPKNL Jakarta III Tahun 2025 merupakan bahan monitoring dan evaluasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi DJKN yaitu:

”Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Jakarta III memiliki 5 (lima) misi yang selaras dengan visi misi DJKN yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum., pemulihan aset, serta mendukung proses penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kementerian Keuangan Satu.

Dalam menjalankan tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta III menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara.

4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian.
6. Pelaksanaan pelayanan lelang.
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang.
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil Lelang.
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta III. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Jakarta III Tahun 2025, telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) IKU dengan capaian 116,79% sebagai berikut:

KODE	IKU	V/C	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120
Stakeholder Perspective (30%)						
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100,00%	133,72%	133,72	120,00
1b-CP	Indeks Integritas	P/L	100,00	105,29	105,29	105,29
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	P/M	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Customer Perspective (20%)						
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					

2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	100,00%	121,46%	121,46	120,00
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/L	100,00%	101,19%	101,19	101,19
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100,00%	100,49%	100,49	100,49
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74,00	117,50	158,78	120,00
Internal Process Perspective (25%)						
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif					
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100,00%	123,57%	123,57	120,00
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	P/M	100,00%	120,00%	120,00	120,00
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	100%	231,33%	231,33	120,00
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70%	109,66%	156,66	120,00
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80,00%	105,30%	131,62	120,00
Learning and Growth Perspective (25%)						
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	P/M	100,00	120,00	120,00	120,00
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100,00	120,00	120,00	120,00
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	80,00%	98,00%	122,50	120,00
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif					
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100,00	117,42	117,42	117,42
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80,00	117,25	146,56	120,00

8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif					
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	80,00	99,52	124,40	120,00
8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	P/M	95,30%	110,65%	116,11	116,11
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	P/M	100,00	135,14	135,14	120,00
NKO					116,79	

Dalam proses pencapaian kinerja selama tahun 2025, tentunya KPKNL Jakarta III tidak terlepas dari berbagai hambatan yang harus dihadapi. Namun demikian, berlandaskan pada semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesional, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, seluruh pegawai KPKNL Jakarta III telah berkomitmen untuk selalu mengupayakan yang terbaik dan optimistis dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Selanjutnya, di masa yang akan datang diharapkan semua capaian sasaran strategis dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan lebih baik dari tahun 2025.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	vi

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
	C. Aspek Strategis Organisasi	5
	D. Isu Strategis Organisasi	8
	E. Sistematika Laporan	9

BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Perencanaan Strategis	11
	B. Penetapan Perjanjian Kinerja	14
	C. Addendum Perjanjian Kinerja	15

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	16
	B. Kinerja Lainnya	42
	C. Realisasi Anggaran	43

BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan Umum	44
	B. Strategi Pemecahan Masalah untuk Tahun Mendatang	44

LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
NKO 2025	
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h), Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 adalah unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KPKNL Jakarta III dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Jakarta III dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 berdasarkan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

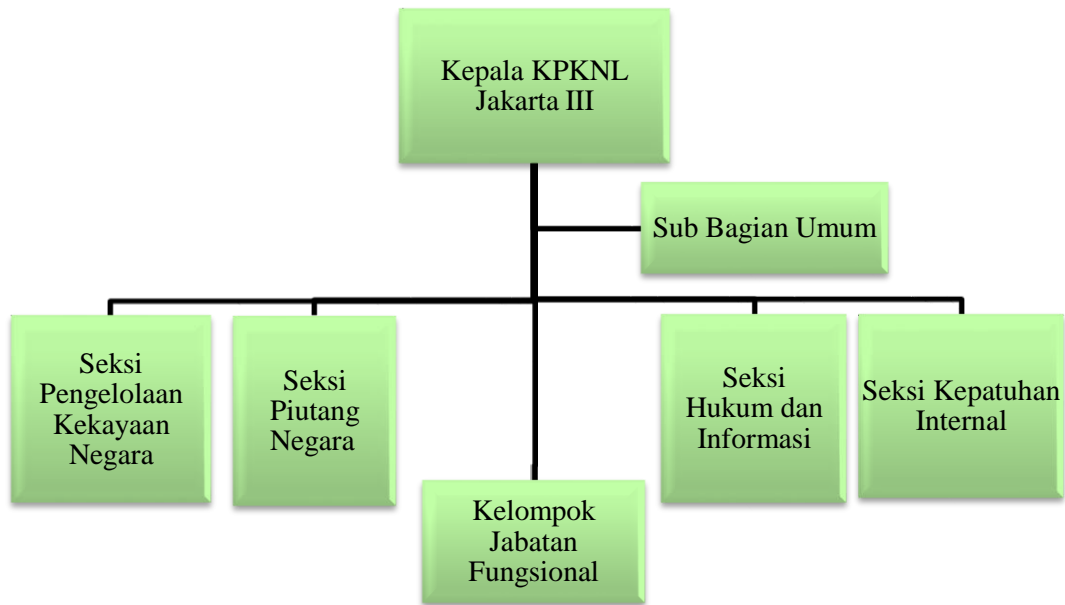
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/ tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Jakarta III mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung utang/penjamin utang.
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah utang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung utang dan/atau penjamin utang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian.
6. Pelaksanaan pelayanan lelang.
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Struktur Organisasi KPKNL Jakarta III



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Jakarta III didukung oleh 41 (empat puluh satu) orang pegawai (termasuk 1 orang pegawai tugas belajar dan 1 orang pegawai cuti besar) dengan komposisi sebagai berikut.

Komposisi Pegawai berdasarkan Gender

No	Gender	Total Pegawai
1.	Laki-laki	24
2.	Perempuan	17
Total Pegawai		41

Data Kepegawaian per 31 Desember 2025

Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Total Pegawai
1.	SMA	1
2.	D1	1
3.	D3	3
4.	D4/S1	28
5.	S2	8
Total Pegawai		41

Data Kepegawaian per 31 Desember 2025

Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Total Pegawai
1.	III.a	7
2.	III.b	11
3.	III.c	4
4.	III.d	14
5.	IV.a	4
6.	IV.b	1
Total Pegawai		41

Data Kepegawaian per 31 Desember 2025

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Total Pegawai
1.	Pelelang Ahli Madya	2
2.	Pelelang Ahli Muda	4
3.	Pelelang Ahli Pertama	1
4.	Penilai Pemerintah Ahli Muda	2
5.	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	1
6.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
Total Pegawai		11

Data Kepegawaian per 31 Desember 2025

Komposisi Pegawai berdasarkan Generasi

No	Golongan	Total Pegawai
1.	Gen X	17
2.	Gen Y	24
Total Pegawai		41

Data Kepegawaian per 31 Desember 2025

C. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta III memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta III turut berperand dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Jakarta III selaku *asset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Jakarta III senantiasa mendorong Kementerian/Lembaga untuk melakukan 3T dalam pengelolaan BMN, yaitu Tertib Administrasi, Tertib Hukum, dan Tertib Fisik. Terlebih dengan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan BMN, maka DJKN dituntut untuk dapat menjadi *distinguished asset manager*. Hal tersebut berarti sebuah tantangan untuk menjadi *asset manager* yang disegani dan dihormati dalam efektifitas dan produktifitas yang kemudian betul-betul bisa mengelola aset menjadi bermanfaat baik dari sisi ekonomi, sosial dan juga finansial. Pengelolaan BMN didorong agar mampu berperan dalam mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja dan pembiayaan APBN serta penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional.

2. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan – badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada DJKN cq. Panitia

Urusan Piutang Negara. Begitupun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, maka fokus pengurusan piutang negara difokuskan kepada penyerahan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah.

Selain itu, berkaitan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal dari Penyerahan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian atau Seluruhnya Dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan SE-1/KN/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pengurusan Piutang Penyerahan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka sepanjang tahun 2024 KPKNL Jakarta III telah memproses pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara kepada penyerah piutang BUMN/BUMD.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPKNL Jakarta III secara konsisten dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penerimaan negara. Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan biaya yang dipungut oleh PUPN atas layanan pengurusan piutang negara pada saat penanggung utang melakukan angsuran/pelunasan. Selain itu, dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Jakarta III memungut Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

4. Kepatuhan Internal

Unit Kepatuhan Internal merupakan unit khusus pada KPKNL Jakarta III yang berperan dalam pemantauan atas fungsi pengendalian internal. Pada KPKNL Jakarta III memiliki Seksi Kepatuhan Internal yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Oleh karena itu adanya seksi kepatuhan internal sangat berpengaruh dalam mendorong penyelesaian masalah secara cepat dan terbuka dan mengantisipasi kesalahan yang semakin besar dan berulang karena menjadi bagian dari manajemen unit kerja.

5. Hukum dan Informasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPKNL Jakarta III juga menghadapi permasalahan-permasalahan hukum. Dalam upaya penegakan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi lelang atau sita kadang kala harus beririsan dengan kepentingan beberapa pihak yang tidak patuh atau masih berupaya menempuh jalur hukum. Disinilah peran Seksi Hukum dan Informasi yang Seksi Hukum dan Informasi bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum. Selain memberikan pelayanan di bidang hukum, Seksi Hukum dan Informasi berperan dalam perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, terdapat tugas berupa pengawasan terhadap implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat melalui penyusunan berita, pengelolaan media sosial, penyebaran informasi melalui berbagai media grafis, fotografi, maupun videografi.

6. Memberikan Pelayanan Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah inventarisasi dilakukan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian Barang Milik Negara tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Hasil penilaian Barang Milik Negara tersebut antara lain akan digunakan dalam penyesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan dapat digunakan sebagai dasar tersedianya *underlying aset* sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia. Selain itu, penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara. Dengan demikian, pengelolaan kekayaan negara, menjadi optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

7. Memberikan Pelayanan Lelang

Lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum dan terbuka, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang juga dapat dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan.

Lelang mempunyai nilai manfaat lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu antara lain lebih transparan, akuntabel, efisien dan menjamin kepastian hukum. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar masyarakat memandang lelang sebagai suatu alternatif pelaksanaan jual beli yang aman dan menguntungkan.

D. Isu Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tahun 2025, KPKNL Jakarta III mengalami beberapa permasalahan utama, diantaranya:

1. Capaian optimalisasi pengelolaan aset negara cenderung lambat.
2. Terdapat potensi tidak laku untuk barang bergerak dan tidak bergerak khusus untuk Lelang Noneksekusi barang milik lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
3. Upaya pencapaian penurunan nilai saldo piutang negara sangat *challenging*.
4. Upaya mencapai target serifikasi BMN berupa tanah cenderung menantang.
5. Penyelesaian BKPN dengan cara BKPN lunas capaiannya rendah.
6. Penyelesaian beberapa layanan penilaian melewati norma waktu.
7. Menurunnya nilai IKPA pada komponen Belanja Kontraktual bagian Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak.
8. Terdapat potensi tidak laku untuk barang bergerak dan tidak bergerak khusus untuk Lelang Noneksekusi barang milik lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
9. Adanya potensi nilai IKU penanganan permasalahan hukum tidak optimal karena tahapan penanganan yang belum terpenuhi.

Terhadap permasalahan tersebut, tindak lanjut yang telah dilaksanakan KPKNL Jakarta III diantaranya:

1. Menyediakan data akurat dan lengkap pada formulir pendataan dan perhitungan, mendorong satuan kerja melakukan optimalisasi BMN target dan Melakukan penggantian target optimalisasi BMN yang tidak memenuhi kaidah optimalisasi.

2. Memberi edukasi kepada *stakeholder* bahwa untuk mengupdate nilai objek lelang, melaksanakan lelang serentak, melaksanakan penggalian potensi lelang, memetakan potensi lelang, dan melaksanakan lelang AYDA.
3. Menggali data debitur ke dinas catatan sipil dan ditjen AHU, mengupayakan ditemukannya harta kekayaan lain (HKL) dan informasi pendukungnya ke kantor pertanahan dan ditjen AHU, dan melaksanakan lelang ulang.
4. Koordinasi dengan satker, Kanwil DJKN DKI Jakarta, dan Kanwil BPN DKI, Koordinasi dengan satuan kerja yang memiliki target terkait penyelesaian target K2, K3 dan K4.
5. Menggali data debitur ke dinas catatan sipil dan ditjen AHU, melacak data penanggung utang dan ahli warisnya ke instansi terkait kemampuan penanggung utang untuk membayar dan harta kekayaan lain penanggung utang, mengupayakan ditemukannya harta kekayaan lain (HKL) dan informasi pendukungnya ke kantor pertanahan dan ditjen AHU, melaksanakan lelang ulang, penagihan langsung dan pengembalian BKPN.
6. Telah menyampaikan permohonan tambahan pejabat fungsional penilai kepada Kasubbag Umum.
7. Memberi edukasi kepada *stakeholder* bahwa untuk mengupdate nilai objek lelang, melaksanakan penggalian potensi lelang, melaksanakan lelang serentak, dan menyelenggarakan sosialisasi terkait lelang.
8. Mengajukan banding nilai IKPA kepada KPPN Jakarta untuk kemudian diteruskan kepada Direktora Pelaksanaan Anggaran dan terus melakukan *follow up* Nota Dinas banding dengan CSO KPPN Jakarta II.
9. Menyampaikan isu tersebut pada forum pembinaan bantuan hukum dari bidang KIH Kanwil dan tetap melaksanakan penanganan permasalahan hukum dan menunggu arahan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat terkait *cut off* perhitungan capaian Triwulan IV Tahun 2025.

E. Sistematika Laporan

Dalam rangka memudahkan penyajian dan pemahaman terhadap isi laporan, maka laporan ini disusun menggunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Daftar Isi
4. Bab I Pendahuluan
5. Bab II Perencanaan Kinerja

6. Bab III Akuntabilitas Kinerja
7. Bab IV Penutup
8. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan visi tahun 2025–2029, yaitu menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan. Visi ini mencerminkan komitmen DJKN untuk tidak hanya menjaga dan mengelola kekayaan negara, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan tersebut memberikan nilai tambah yang nyata, berkelanjutan, serta mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan visi tersebut, DJKN menetapkan empat misi utama, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum., pemulihan aset, serta mendukung proses penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kementerian Keuangan Satu.

Sejalan dengan misi tersebut, DJKN menetapkan tujuan strategis yang secara substansi merupakan penguatan dan penegasan dari setiap misi. Tujuan DJKN meliputi:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan bagi kepentingan

negara.

3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif guna mendukung layanan prima.

Selanjutnya, tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis DJKN, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal serta mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

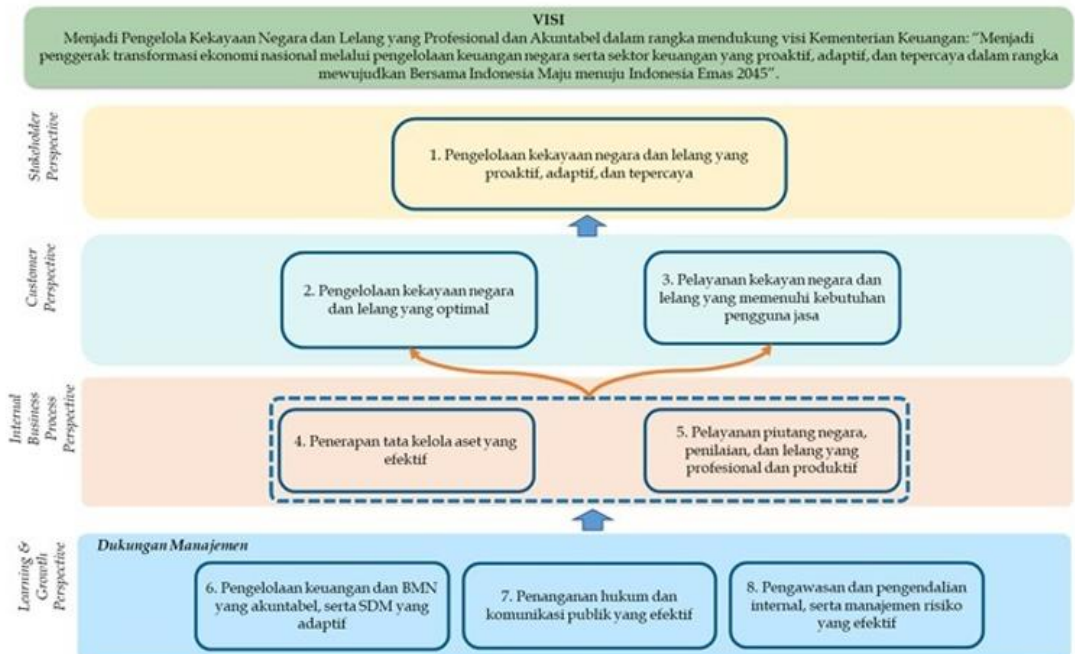
Keseluruhan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut menjadi landasan utama bagi seluruh unit kerja DJKN, termasuk KPKNL Jakarta III, dalam menyusun perencanaan, melaksanakan program dan kegiatan, serta melakukan evaluasi kinerja. Dengan berpedoman pada Renstra DJKN 2025–2029, KPKNL Jakarta III memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa selaras dengan arah kebijakan strategis DJKN dan mendukung pencapaian visi Kementerian Keuangan secara menyeluruh.

Sasaran yang hendak tercapai tersebut, tergambar dalam peta strategi KPKNL Jakarta III Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta III. Peta Strategi KPKNL Jakarta III Tahun 2025 memuat 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. *Stakeholder Perspective*, dengan satu sasaran berupa Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya.
2. *Customer Perspective*, dengan dua sasaran berupa Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal dan Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa.
3. *Internal Process Perspective*, dengan dua sasaran berupa Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif dan Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif.
4. *Learning & Growth Perspective*, dengan tiga sasaran berupa Pengelolaan

Keuangan dan BMN yang Akuntabel,serta SDM yang Adaptif, Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif, dab Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif.

Peta Strategi



Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta III melaksanakan program yaitu:

1. Peningkatan penerimaan negara dari pengelolaan BMN dan lelang (PNBP).
2. Peningkatan penagihan piutang negara secara intensif.
3. Pengelolaan Aset.
4. Melaksanakan percepatan penyelesaian outstanding piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN dan upaya peningkatan kontribusi penerimaan negara terhadap perekonomian sebagai salah satu strategi pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi yaitu dengan memberikan keringanan utang.
5. Optimalisasi Lelang Online dan Permohonan Lelang Online.
6. Peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa dengan berpedoman pada SOP.
7. Optimalisasi Satu Kemenkeu dalam tata persuratan.
8. Sapa Pagi yang dilaksanakan sebagai media pengarahan pimpinan dan rencana kerja setiap pekan bagi pegawai KPKNL Jakarta III.
9. Usulan Pegawai KPKNL Jakarta III untuk mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

B. Penetapan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja KPKNL Jakarta III Nomor PK-3/WKN.07/2025 Tahun 2025 dijabarkan dalam 8 Sasaran Strategis (SS) yang dicapai melalui penetapan 20 target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp90,13 M)
	Indeks integritas	100
	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp894 M)
	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp100 M)
Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%
	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
	Persentase produktivitas lelang	80%
Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95,3%
	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

C. Addendum Perjanjian Kinerja

Selama tahun 2025 tidak terdapat Addendum Perjanjian Kinerja pada KPKNL Jakarta III.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Setelah dilakukan adendum, KPKNL Jakarta III memiliki 8 (delapan) Sasaran Startegis yang dijabarkan ke dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh hasil akhir capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta III sebesar 116,79 (seratus enam belas koma tujuh puluh sembilan), dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 KPKNL Jakarta III

KODE	IKU	V/C	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120
	Stakeholder Perspective (30%)					
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100,00%	133,72%	133,72	120,00
1b-CP	Indeks Integritas	P/L	100,00	105,29	105,29	105,29
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	P/M	100,00%	120,00%	120,00	120,00
	Customer Perspective (20%)					
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	100,00%	121,46%	121,46	120,00
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/L	100,00%	101,19%	101,19	101,19

2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100,00%	100,49%	100,49	100,49
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74,00	117,50	158,78	120,00
Internal Process Perspective (25%)						
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif					
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100,00%	123,57%	123,57	120,00
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	P/M	100,00%	120,00%	120,00	120,00
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	100%	231,33%	231,33	120,00
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70%	109,66%	156,66	120,00
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80,00%	105,30%	131,62	120,00
Learning and Growth Perspective (25%)						
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	P/M	100,00	120,00	120,00	120,00
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100,00	120,00	120,00	120,00
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	80,00%	98,00%	122,50	120,00
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif					
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100,00	117,42	117,42	117,42
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80,00	117,25	146,56	120,00
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif					
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	80,00	99,52	124,40	120,00
8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	P/M	95,30%	110,65%	116,11	116,11

8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	P/M	100,00	135,14	135,14	120,00
NKO					116,79	

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) yang terinci dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian IKU dan kegagalan capaian IKU dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang berhasil dicapai.

Adapun hasil analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya

a. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1a-CP)

Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dibagi menjadi 3 komponen, yaitu PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang.

Nilai Penerimaan Negara yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara, sementara nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. PNBPN Lelang yaitu Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian, bea lelang batal atas permintaan penjual, biaya permohonan lelang, uang jaminan pembeli wanprestasi, dan penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (IKU PNBPN) pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dengan capaian 133,72% atau secara nominal mencapai Rp120,5 Miliar dari targetnya sebesar Rp90,13 Miliar. Seluruh PNBPN baik yang berasal dari transaksi lelang, pengelolaan aset, dan piutang negara berhasil meraih capaian di atas target, dimana capaian tertinggi adalah dari PNBPN yang berasal dari aset dan piutang

negara.

Adapun capaian Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yaitu sebesar Rp120.529.744.053,00 atau 133,72% dari target sebesar Rp90.133.460.000,00. Capaian tersebut berasal dari PNBP Pengelolaan BMN sebesar Rp81.847.457.459,00, PNBP Piutang Negara sebesar Rp5.529.687.473,00, dan PNBP Lelang sebesar Rp33.152.599.121,00.

Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

KPKNL Jakarta III	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	199,42%	122,95%	122,95%	122,25%	122,25%	133,72%	133,72%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam hal penetapan target Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada KPKNL Jakarta III, dalam periode tahun 2020 s.d. 2025 selalu mengalami kenaikan dan capaian yang diperoleh lebih dari 100%. Adapun rinciannya ada pada tabel berikut:

Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2020 s.d. 2025

KPKNL Jakarta III	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target	35.171.824.224 (100%)	43.448.000.000 (100%)	59.812.000.000 (100%)	71.578.086.218 (100%)	84.100.000.000 (100%)	Rp90.133.460.000,00. (100%)
Realisasi	36.019.332.734 (102,41%)	71.253.376.303 (164%)	98.941.607.950 (165,42%)	82.007.149.969 (114,57%)	112.076.861.688 (133,27%)	Rp120.529.744.053,00 9133,72%)
Capaian	102,41%	120%	120%	114,57%	120%	120%

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya mengoptimalkan penerimaan dari pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, memberi edukasi kepada stakeholder bahwa untuk mengupdate nilai objek lelang untuk menghindari potensi tidak laku akibat nilai objek lelang yang sudah tidak relevan dengan nilai objek saat ini, dan melakukan upaya penagihan dengan pemanggilan dan penelitian lapangan.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU tersebut diantaranya melakukan penggalian potensi pemanfaatan BMN dan lelang serta melakukan penelitian dan pemeriksaan piutang lebih lanjut.

b. IKU Indeks Integritas (1b-CP)

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

Pada IKU ini, realisasi KPKNL Jakarta III sebesar 105.29 dari target 100 sehingga indeks integritas mencapai 105.29%.

Capaian IKU Indeks Integritas

KPKNL Jakarta III	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1b-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	100%	100%	100%					
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya (1) Melakukan identifikasi titik rawan (*Risk Profiling*) praktik gratifikasi; (2) *Campaign*/internalisasi pencegahan pelanggaran disiplin di lingkungan DJKN; (3) Pemetaan/identifikasi benturan kepentingan serta monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; (4) Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi pesan/nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh pegawai pada internal unit kerja; (5) Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi dan/atau koordinasi untuk menyampaikan pesan/nilai-nilai antikorupsi kepada pihak eksternal; (6) Internalisasi ketentuan dan kebijakan penggunaan fasilitas kantor terutama kendaraan dinas; (6) Melakukan pemantauan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi; (7)

Pelatihan/internalisasi mengenai mekanisme dan prosedur layanan serta pengelolaan pengaduan; (9) Publikasi infografis layanan sebagai bentuk edukasi/sosialisasi prosedur layanan kepada pengguna layanan; dan (10) Diseminasi kebijakan dan pengelolaan SDM terkait promosi/pola mutasi di lingkungan DJKN.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan Indeks Integritas dapat berupa menjadikan sosialisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, penerapan kode etik ASN yang pengawasan internal dan eksternal yang ketat, dan penerapan sanksi pelanggaran yang sesuai, serta memenuhi dokumen dan pelaksanaan kegiatan pendukung peningkatan integritas.

c. IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan (1c-CP)

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan, dan stakeholders.

Pada tahun 2025, IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK)
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024

Penambahan capaian *extra effort* maksimal 5% dari jumlah unit yang melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) dibanding jumlah unit yang disepakati melakukan FKP (958 unit).

Guna mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan atas standar pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Jakarta III, maka setiap triwulan dilaksanakan pengukuran Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dengan alat ukur berupa kuesioner/survei yang menggambarkan pelayanan secara umum yang telah diberikan oleh KPKNL Jakarta III.

Sebelumnya KPKNL Jakarta III melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna

Layanan (SKPL) secara mandiri, namun mulai triwulan II tahun 2025 Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan penataan mekanisme survei layanan pada seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan melalui e-SKPL

KPKNL Jakarta III pada tahun 2025 memperoleh capaian IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan sebesar 120% dari target sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut.

Capaian IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.							
	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	27,78%	83,33%	83,33%	100%	100%	112,19%	112,19%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	112%	112%	

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya penyampaian laporan berkala mengenai tindak lanjut pengelolaan saluran pengaduan yang dilaporkan oleh pengelola pengaduan kepada pimpinan unit; penyampaian laporan hasil survei Kepuasan Penggunal Layanan secara periodik dan penyampaian link Survei Kepuasan Pengguna Layanan.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan stakeholder dan pengguna layanan dimaksud, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi serta responsif atas pengaduan/keluhan dari pengguna jasa dengan tetap mengacu pada peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku.

2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

a. IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara (2a-CP)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan.

Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Target IKU ini pada tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 121,46% dengan capaian 120% dengan rincian sebagai berikut:

Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

KPKNL Jakarta III	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/KP
Target	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	111,54%	122,02%	122,02%	125,54%	125,54%	121,46%	121,46%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya menyediakan data akurat dan lengkap pada formulir pendataan & perhitungan; mendorong satuan kerja melakukan optimalisasi BMN target; dan melakukan penggantian target optimalisasi BMN yang tidak memenuhi kaidah optimalisasi.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini diantaranya Menyediakan data akurat dan lengkap pada formulir pendataan & perhitungan; Mendorong satuan kerja melakukan optimalisasi BMN target; Melakukan penghapusan target optimalisasi BMN yang telah mengalami perubahan kodefikasi & bersengketa.

b. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang (2b-CP)

Lelang memiliki peranan dalam perekonomian nasional yaitu :

- 1) Pengelolaan Keuangan Negara melalui penjualan BMN/D, barang milik desa, barang milik BUMN/D, perorangan, aset harta pailit, barang temuan, aset dari tegahan Bea dan Cukai, aset bank dalam likuidasi, dan sebagainya.
- 2) Penegakan Hukum melalui berbagai jenis lelang eksekusi. Seperti Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi UUHT, Lelang Eksekusi Pengadilan, Rampasan Kejaksaan, Sitaan KPK, Gadai, Lelang PT Pegadaian, dan sebagainya.
- 3) Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di bidang lelang antara lain sebagai Pejabat Lelang Swasta (Kelas II), para pegawai Kantor PL II, mendukung penjualan barang UMKM, mendukung penjualan hasil hutan, dan sebagainya.

Dari pelaksanaan lelang yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, didapatkan hasil lelang yang direpresentasikan oleh Pokok Lelang dan PNPB Lelang. Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Capaian untuk IKU Persentase realisasi pokok lelang tahun 2025 berhasil melebihi target yang ditetapkan. Secara nominal realisasi pokok lelang tercatat sebesar Rp904.666.839.808,00 yang berasal dari pokok lelang PL I sebesar Rp797.767.603.908,00 dan pokok lelang PL Pegadaian sebesar Rp106.899.235.900,00 atau mencapai 101,19% dibandingkan targetnya sebesar 894.000.000.000,00 yang berasal dari pokok lelang PL I sebesar Rp 759.900.000.000,00 dan pokok lelang PL Pegadaian sebesar Rp134.100.000.000,00. Capaian ini diraih melalui upaya penggalan serta pemetaan potensi serta lelang AYDA.

Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

KPKNL Jakarta III	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	429,64%	124,15%	124,15%	102,80%	102,80%	100,64%	100,64%	
Capaian	120%	120%	120%	102,80%	102,80%	100,64%	100,64%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya memberi edukasi kepada *stakeholder* untuk mengupdate nilai objek lelang, melaksanakan lelang serentak, penggalan potensi lelang, dan melaksanakan lelang AYDA.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini diantaranya mempercepat pelayanan permohonan lelang melalui lelang.go.id, berperan serta aktif dalam memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan lelang kepada masyarakat luas serta melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait objek lelang yang memiliki potensi laku terjual

c. IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara (2c-CP)

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDP/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat); dan
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL.

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari :

1. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap); dan
3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

KPKNL Jakarta III pada tahun 2025 memiliki target sebesar Rp100.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp100.492.130.080,73

Capaian Persentase Realisasi Penurunan Saldo Piutang Negara

KPKNL Jakarta III	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	27,63%	23,33%	23,33%	92,62%	92,62%	100,49%	100,49%	
Capaian	27,63%	23,33%	23,33%	92,62%	92,62%	100,49%	100,49%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya menggali data debitur ke dinas catatan sipil dan ditjen AHU, mengupayakan ditemukannya harta kekayaan lain (HKL) dan informasi pendukungnya ke kantor pertanahan dan ditjen AHU serta melaksanakan lelang ulang.

Action plan dalam mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu menyampaikan surat paksa dan penagihan secara langsung kepada penanggung hutang, serta melakukan optimalisasi pengurusan piutang negara, menggali data debitur ke dinas catatan sipil dan ditjen AHU, mengupayakan ditemukannya harta kekayaan lain (HKL) dan informasi pendukungnya ke kantor pertanahan dan ditjen AHU dan melaksanakan lelang ulang.

3. Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

a. IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi (3a-CP)

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

Pada tahun 2025 KPKNL Jakarta III memiliki target sebesar 74 dengan realisasi sebesar 117,50, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 120.

Capaian Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

KPKNL Jakarta III	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	100	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	110	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya yaitu melaksanakan edukasi dan komunikasi kepada para stakeholder.

Action plan dalam mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu menyampaikan materi/rencana pelaksanaan edukasi Triwulan I/2026 kepada Kanwil c.q. Bidang Lelang dan Bidang Piutang Negara.

4. Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

a. IKU Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan (4a-CP)

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang clean and clear (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang not clean but clear (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang not clean and not clear (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama

Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. disamping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.

IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan mencapai 123,57%. Pada periode ini tercapai 4.131 bidang tanah yang disertipikatkan dari targetnya di tahun 2025 sebanyak 3.343 bidang tanah.

Capaian Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan

KPKNL Jakarta III	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan.							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	6,49%	53,16%	53,16%	73,89%	73,89%	123,57%	123,57%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya yaitu melakukan koordinasi dengan satker, Kanwil DJKN DKI Jakarta, dan Kanwil BPN DKI, Koordinasi dengan satuan kerja yang memiliki target terkait penyelesaian target K2, K3 dan K4.

Action plan dalam mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu menjalin kerjasama yang solid dengan satker dan kantar guna mempercepat proses penyetipikatan dan mengadakan rapat triwulanan yang dihadiri Kanwil BPN, Kantah, Kanwil DJKN, KPKNL serta Satker Pemohon untuk membahas kendala dan solusi.

b. IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (4b-CP)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak

lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalu Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

Capaian untuk tindak lanjut bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan komitmen penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan atau persetujuan pengelola barang. Jika direkomendasikan untuk diserahkan kepada Pengelola Barang, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan Pengguna Barang.

Persentase evaluasi kinerja BMN mencapai 120%. Capaian ini jauh melebihi target pada Tahun 2025 sebesar 100%.

Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Nama Unit	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	17%	44%	44%	92%	92%	173%	173%	
Capaian	120%	120%	120%	115%	115%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya memetakan daftar aset yang belum dilakukan evaluasi kinerja, melakukan survey lapangan maupun desk valuation evaluasi kinerja aset, melakukan perhitungan evaluasi kinerja BMN melalui aplikasi SIMAN 2, dan menyampaikan hasil perhitungan kinerja BMN kepada satker.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu tetap terus berkoordinasi dengan satuan kerja dan melaksanakan survei lapangan terhadap BMN yang belum dilakukan survei.

5. Sasaran Strategis 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

a. IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (5a-CP)

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa:

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara
 - a. Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - b. Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara
 - a. Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - b. Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal
 - a. Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan

Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);

- b. Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN.

Target di 2025 sejumlah 250 Berkas Piutang Negara Diselesaikan berasal dari Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara dan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara. target pada Tahun 2025 sebesar 100%.

Capaian untuk Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara tercapai pada tahun 2025 berhasil melampaui jauh targetnya dengan capaian sebesar 231,33% dimana dari 400 berkas yang ditargetkan penyelesaiannya, telah diselesaikan sebanyak 925 berkas.

Capaian IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

KPKNL Jakarta III	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	117,20%	123,65%	123,65%	117,87%	117,87%	231,33%	231,33%	
Capaian	117,20%	120%	120%	117,87%	117,87%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya menggali data debitur ke dinas catatan sipil dan ditjen AHU, melacak data penanggung utang dan ahli warisnya ke instansi terkait kemampuan penanggung utang untuk membayar dan harta kekayaan lain penanggung utang, dan mengupayakan ditemukannya harta kekayaan lain (HKL) dan informasi pendukungnya ke kantor pertanahan dan ditjen AHU.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu melanjutkan upaya menggali data debitur ke dinas catatan sipil dan ditjen AHU, melacak data penanggung utang dan ahli warisnya ke instansi terkait kemampuan penanggung utang untuk membayar dan harta kekayaan lain penanggung utang, mengupayakan ditemukannya harta kekayaan lain

(HKL) dan informasi pendukungnya ke kantor pertanahan dan ditjen AHU, dan melaksanakan lelang ulang.

b. IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian (5b-CP)

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

Capaian IKU Tingkat kualitas layanan penilaian pada Tahun 2025 sebesar 109,66% dari targetnya sebesar 80%, sehingga capaian IKU mencapai 120%.

Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

KPKNL Jakarta III	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoUKP
Target	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	109,93%	171,43%	171,43%	115,37%	115,37%	104,22%	109,66%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya telah menyampaikan permohonan tambahan pejabat fungsional penilai kepada Kasubbag Umum.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu melaksanakan layanan penilaian sesuai norma waktu dan monitoring hasil kaji ulang laporan yang dilakukan oleh Kanwil.

c. IKU Persentase Produktivitas Lelang (5c-CP)

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi

perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Sejalan dengan capaian pokok lelang yang mencapai target, IKU Persentase produktivitas lelang juga mencapai target. Pada periode Triwulan IV/2025 ini dari target 80%, dapat dicapai produksi lelang sebesar 105,30%.

Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang

KPKNL Jakarta III	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PolIKP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	
Realisasi	177,38%	69,19%	69,19%	91,02%	91,02%	105,30%	105,30%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya memberi edukasi kepada *stakeholder* bahwa untuk mengupdate nilai objek lelang, melaksanakan penggalan potensi lelang, melaksanakan lelang serentak dan rutin dan menyelenggarakan sosialisasi terkait lelang.

Action plan yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan IKU ini yaitu mempercepat pelayanan permohonan lelang melalui lelang.go.id, edukasi terhadap pengguna jasa, penggalan potensi lelang, melaksanakan lelang serentak dan rutin, serta menyebarluaskan informasi lelang melalui media sosial resmi KPKNL Jakarta III.

6. Sasaran Strategis 6: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Produktif

a. IKU Tingkat Kualitas Kinerja Anggaran (6a-CP)

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun 2024 pasal 249 ayat (7) .

Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

IKU Indeks kualitas kinerja anggaran pada tahun 2025 tercapai realisasi sebesar 120%.

Capaian Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

KPKNL Jakarta III	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	6a-CP Tingkat kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoM/KP
Target	100%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
Realisasi	120%	103,47%	103,47%	102%	102%	120%	120%	
Capaian	100%	120%	120%	102%	102%	120%	120%	

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Jakarta III dengan status capaian hijau dikarenakan penyerapan anggaran yang optimal. Tindakan yang telah dilaksanakan adalah dengan memberikan himbauan ke seluruh seksi/subbagian umum serta bidang tugas yang ada untuk segera melakukan kegiatan yang dalam rangka penyerapan anggaran maupun pencapaian output, serta mengajukan banding nilai IKPA kepada KPPN Jakarta untuk kemudian diteruskan kepada Direktora Pelaksanaan Anggaran.

Action plan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan koordinasi antara subbag umum dengan seluruh seksi dan fungsional dalam hal identifikasi kegiatan yang perlu dilakukan dan penyusunan RPD secara tepat.

b. IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (6b-CP)

IKU ini mengukur komponen berikut:

- a. Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri)
- b. Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

IKU Indeks pengadaan barang dan jasa pada tahun 2025 ini tercapai 120%.

Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

KPKNL Jakarta III	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	6a-CP Tingkat kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
Realisasi	120%	103,47%	103,47%	102%	102%	120%	120%	
Capaian	100%	120%	120%	102%	102%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya selalu melakukan pengecekan angka TKDN atas barang yang akan dibeli, mencari alternatif barang lain atau merk lain apabila barang yang akan diadakan memiliki TKDN di bawah 50%, dan memilih menggunakan produk milik BUMN seperti melakukan pembelian BBM pada SPBU Pertamina.

Action plan yang dilaksanakan adalah memastikan selalu memilih produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, dan memastikan selalu memilih produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

c. IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (6c-CP)

KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan sebagai IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai. IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat.

KPKNL Jakarta III sangat fokus mendorong pegawainya untuk terus melakukan pengembangan diri melalui diklat, workshop, loka karya, webinar maupun melanjutkan pendidikan. Hal ini agar seluruh pegawai KPKNL Jakarta III dapat memberikan layanan yang terbaik kepada Pengguna Jasa dengan sikap yang sesuai dengan salah satu Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu aspek Profesionalisme.

IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai target pada tahun 2025 tercapai 93,20% dari targetnya sebesar 80% dengan terpenuhinya

kegiatan pemenuhan jamlat pegawai, pelaksanaan sharing session bintal Kejiwaan, pelaksanaan sharing session sinergi antargenerasi (narasumber kepala kantor dan agen perubahan), penyampaian rekomendasi pelatihan yang dapat diikuti kepada pegawai yang masih belum memenuhi jamlat pelatihan, serta pelaksanaan survei untuk memperoleh feedback pegawai atas pelaksanaan bintal.

Capaian Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

KPKNL Jakarta III	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	6c-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	a.d. Q3	Q4	Y-25	PoWKP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	70%	70%	
Realisasi	30%	65%	65%	81%	81%	93,20%	93,20%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	116,50%	116,50%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya dengan monitoring kegiatan pemenuhan jamlat pegawai, pelaksanaan sharing session bintal Kejiwaan, pelaksanaan sharing session sinergi antargenerasi, penyampaian rekomendasi pelatihan yang dapat diikuti kepada pegawai yang masih belum memenuhi jamlat pelatihan, serta pelaksanaan survei untuk memperoleh feedback pegawai atas pelaksanaan bintal.

Action plan atas IKU ini diantaranya dengan selalu update memberikan informasi pelatihan pada pegawai dan selalu mendorong pegawai KPKNL Jakarta III untuk mengikuti pelatihan klasikan maupun non klasikal.

7. Sasaran Strategis 7: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

a. IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum (7a-CP)

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%)
- b. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%).

Realisasi atas IKU Indeks penanganan permasalahan hukum pada Tahun 2025 mencapai 117,42 dari targetnya sebesar 100.

Capaian Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

KPKNL Jakarta III	Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif							Pol/KP
	7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	114,97	114,36	114,36	113,95%	113,95%	117,42%	117,42%	
Capaian	114,97	114,36	114,36	113,95%	113,95%	117,42%	117,42%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya menyampaikan isu adanya potensi nilai IKU penanganan permasalahan hukum tidak optimal karena tahapan penanganan yang belum terpenuhi pada forum pembinaan bantuan hukum dari bidang KIH Kanwil, dan tetap melaksanakan penanganan permasalahan hukum dan menunggu arahan Dit. Hukum dan Hubungan Masyarakat terkait cut off perhitungan capaian Triwulan IV/2025.

Action plan yang dilaksanakan adalah dengan mengusulkan tambahan pegawai yang berlatar belakang bidang hukum.

b. IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) (7b-CP)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022.

Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di

atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Realisasi Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) untuk pada periode Triwulan IV/2025 mencapai 117,25 dari targetnya sebesar 80, sehingga capaian IKU menjadi 120%.

Capaian Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

KPKNL Jakarta III	Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif							
	7b-CP Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	118	116	116	112,06	112,06	116%	117,25%	
Capaian	118	120	120	120	120	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya merespon permohonan informasi publik yang ada sesuai norma waktu berlaku, segera mengupdate informasi publik pada website DJKN sesuai dengan panduan Direktorat Hukum dan Humas, serta menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik kepada pelaksanan PPID di atasnya tepat waktu.

Action plan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IKU ini yaitu melakukan upaya *extra effort* yang telah dilakukan tahun sebelumnya dan menindaklanjuti kegiatan-kegiatan mandatory sesuai arahan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

8. Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian Internal serta Manajemen Risiko yang Efektif

a. IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko (8a-N)

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen

risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Realisasi Indeks Manajemen dan Risiko sudah berjalan *on the track* dengan mencapai indeks 92,13 dari targetnya 80 sehingga capaian IKU menjadi sebesar 115,16%.

Capaian Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

KPKNL Jakarta III	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif 8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko								
	T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	100	89,79	89,79	99,72%	99,72%	92,13%	92,13%		
Capaian	120	120	120	120	120	115,16%	115,16%		

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 diantaranya melaksanakan sosialisasi manajemen kinerja dan risiko, keikutsertaan dalam e-learning manajemen risiko dan kinerja, dan pelaksanaan DKO manajemen risiko dan kinerja.

Action plan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini diantaranya dengan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko, penyusunan SK Tim Manajemen dan Risiko, Penyusunan SK Tim Manajemen dan Risiko, penyusunan Profil Risiko Tahun 2026, dan pembahasan manajemen kinerja dan risiko secara berkala yang diikuti oleh seluruh pegawai KPKNL Jakarta III.

b. IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (8b-N)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa Rekomendasi *Policy*

Recommendation, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain *Policy Recommendation*.

IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti mencapai 110,65% dari targetnya sebesar 100% dengan telah diselesaikannya 3 rekomendasi hasil pengawasan Itjen terkait Seksi Piutang Negara dan saat ini sudah berstatus tuntas.

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

KPKNL Jakarta III	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-245	Pol/KP
Target	75,50%	82,50%	82,50%	100	100	100	100	
Realisasi	80%	100%	100%	144,75%	144,75%	110,65%	110,65%	
Capaian	105,96%	120%	120%	120%	120%	116,11%	116,11%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 yaitu menyelesaikan 3 temuan/rekomendasi hasil pengawasan itjen. Adapun saat ini status pemenuhan rekomendasi adalah "tuntas".

Action plan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu Monitoring temuan yang terbit dan melaksanakan pemenuhan rekomendasi.

c. **IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI WBK/WBBM**

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan

Kementerian Keuangan.

Capaian IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM sesuai target yaitu 135,14 dengan terpenuhinya kegiatan/dokumen kriteria ZI-WBK serta pelaksanaan *field evaluation*.

**Capaian Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan
Pembangunan ZI WBK/WBBM**

KPKNL Jakarta III	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8e-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-245	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	100	100	100	100	135,14%	135,14%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 yaitu pelaksanaan *field evaluation* dan pemenuhan dokumen pendukung.

IKU ini merupakan IKU yang tidak muncul setiap tahun, tergantung dengan tingkatan masing-masing KPKNL dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM.

B. Kinerja Lainnya

1. Inovasi Kuitansi Lelang Online

Inovasi Kuitansi Lelang Online untuk pelaksanaan lelang sebelum tahun 2025 yang diinisiasi oleh Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta III, Andru Ryvano Abrir. Dengan inovasi ini, Pemenang Lelang tidak perlu datang ke APT KPKNL Jakarta III untuk bermohon kuitansi lelang, cukup dengan mengisi link <https://s.id/KuitansiJakarta3> dan melengkapi data yang diperlukan, Pemenang Lelang dapat mendapatkan kuitansi online secara efektif dan efisien.

2. Lelang Hakordia 2025 Sukses

KPKNL Jakarta III bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sukses menyelenggarakan Lelang Hakordia Tahun 2024 pada Selasa, 9 Desember 2025 bertempat di Gedung Juang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Dari 78 lot yang ditawarkan KPKNL Jakarta III, sebanyak 61 lot berhasil terjual dengan nilai capaian mencapai Rp8,6 miliar. Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi aktif KPKNL Jakarta III dalam mendukung upaya pemulihan aset (*asset recovery*) dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Selain lelang Hakordia, KPKNL Jakarta III bersama KPK rutin menyelenggarakan lelang serentak barang rampasan KPK yang dilaksanakan secara triwulanan.

3. Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) KPKNL Jakarta III

Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) KPKNL Jakarta III mengadakan kegiatan Pembinaan mental (Bintal Kejiwaan). Kegiatan Bintal di lingkungan KPKNL Jakarta III Tahun 2025 mencakup bidang kejiwaan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kesehatan dan ketahanan fisik dan mental yang optimal melalui pendekatan aspek kejiwaan (psikolog). Tema yang diangkat yaitu "Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental di Tempat Kerja".

C. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025 KPKNL Jakarta III mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Alokasi anggaran tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPKNL Jakarta III Tahun 2025. Adapun keseluruhan anggaran yang tersedia setelah revisi dari blokir dan efisiensi berjumlah Rp3.325.920.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.180.346.840,00 atau sebesar 95,62%, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran KPKNL Jakarta III				
Tahun 2025				
No	Program	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai			
2	Belanja Barang	2.874.513.000,00	2.735.905.122,00	95,18
3	Belanja Modal	451.407.000,00	444.441.718,00	98,46
TOTAL		Rp3.325.920.000,00	Rp. 3.180.346.840,00	95,62

Meskipun anggaran tidak terserap 100% tetapi terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-Three KPKNL Jakarta III Tahun 2025 telah memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta III yaitu sebesar 116,79%. Adapun penyerapan anggaran tahun 2025 pada KPKNL Jakarta III dipengaruhi oleh beberapa kondisi, antara lain:

a. Belanja Pegawai

Pagu anggaran belanja pegawai TA 2025 pada KPKNL Jakarta III sebesar Rp0, hal tersebut dikarenakan adanya sentralisasi belanja pegawai sesuai Perdirjen KN Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai untuk Pegawai Lingkup DJKN.

b. Belanja Barang

Persentase realisasi belanja barang TA 2025 sebesar 95,18% atau sebesar Rp2.735.905.122,00 dari pagu anggaran sebesar Rp2.874.513.000,00.

c. Belanja Modal

Persentase realisasi belanja modal TA 2025 sebesar 98,46% atau sebesar Rp444.441.718,00 dari pagu anggaran sebesar Rp451.407.000,00.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Jakarta III sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintahan. Penyusunan laporan dilakukan untuk mengetahui kinerja organisasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis tahun 2025, pencapaian kinerja atas target yang ditetapkan pada KPKNL Jakarta III seluruhnya tercapai dengan hasil yang optimal dan indikator capaian hijau, sehingga di tahun 2025 ini, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta III berhasil tercapai sebesar 116,79%.

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Laporan Kinerja 2025 memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Jakarta III mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran pengguna barang akan pentingnya pengelolaan kekayaan yang tertib secara administrasi, fisik dan hukum melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara pada pengguna barang.
2. Meningkatkan koordinasi dengan kantor pertanahan dan satuan kerja penatausahaan bidang tanah dalam program pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2026.
3. Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan lelang dan mendorong persepsi positif bahwa lelang merupakan alternatif pelaksanaan jual beli yang mudah, aman, efisien dan menguntungkan.

4. Melaksanakan rekonsiliasi data utang dengan penyerah piutang dalam rangka peningkatan kualitas data saldo piutang yang akurat.
5. Mendorong percepatan penyelesaian piutang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melaksanakan surat paksa, memberikan keringanan hutang dan lelang barang jaminan.
6. Pemantauan terhadap keakuratan data pada aplikasi penunjang seperti SIMAN, SIBANKUM, Fokus PN dan Sistem Informasi Penilaian.
7. Berkoordinasi secara intensif dengan pihak Perbankan dan Balai Lelang terkait pengajuan berkas permohonan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan untuk meningkatkan potensi lelang laku.
8. Mengedukasi Pemohon Lelang tentang Tata Cara Permohonan Lelang guna meminimalisasi permasalahan hukum sebelum dan paska lelang.
9. Meningkatkan komunikasi dengan para pengguna layanan, menerima kritik dan masukan melalui kuisisioner dalam upaya peningkatan layanan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi KPKNL yang berbasis pada kebutuhan pengguna layanan.
10. Mendorong pegawai untuk membuat inovasi guna menghasilkan output pekerjaan yang lebih cepat, akurat, dan efisien.
11. Mendorong pengembangan kompetensi pegawai melalui program pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan, dan analisis beban kerja dalam rangka peningkatan kualitas layanan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas.
12. Mewujudkan Keberlangsungan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Tahun 2026.
13. Berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang Santun, Tertib, Amanah dan Responsif (STAR) sebagai wujud implementasi secara nyata Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) untuk mendukung pencapaian Indonesia Maju.



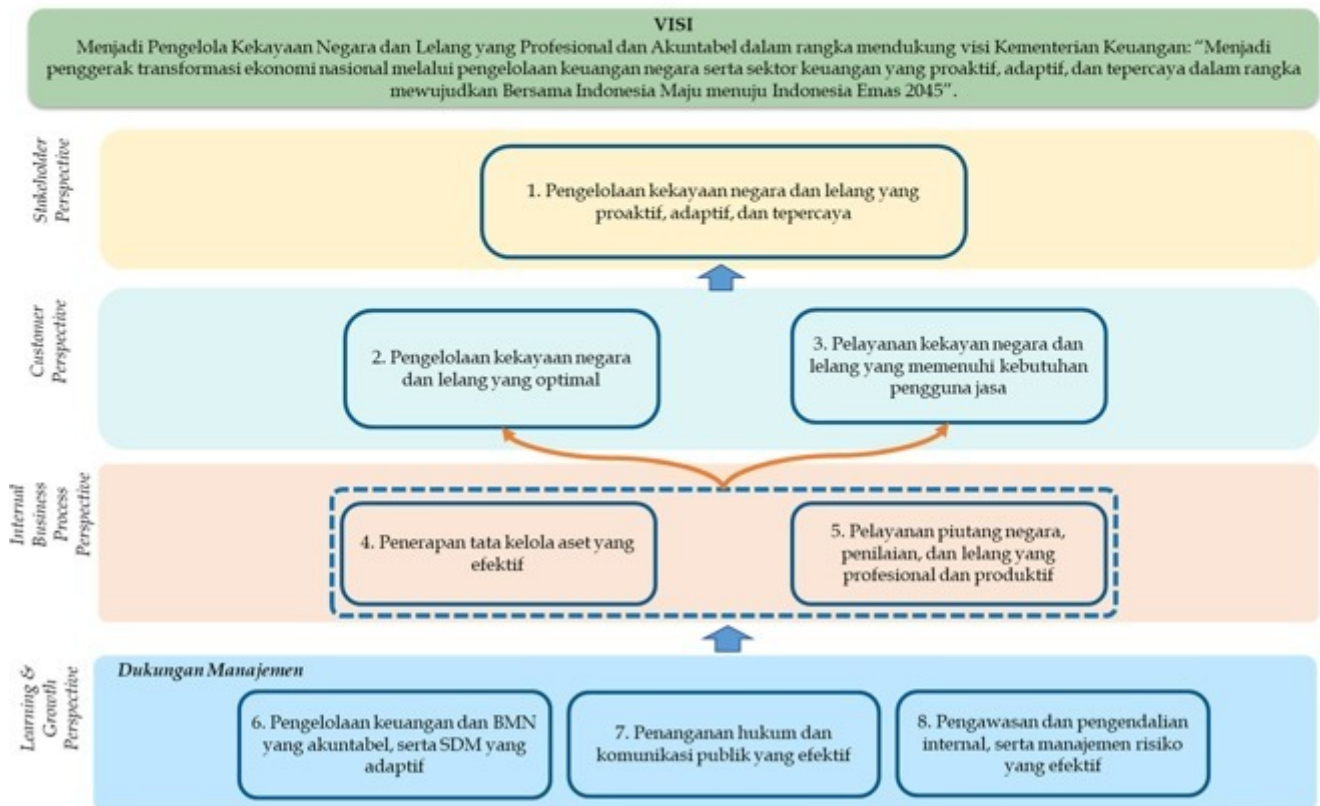
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-3/WKN.07/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA III
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA III
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp90,13 M)
		1b-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp894 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp100 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%
		8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-	100



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		WBK/WBBM	

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Rp1,884,648,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

Rp52,580,000

2. Pengelolaan Aset

Rp1,832,068,000

Program:

Dukungan Manajemen

Rp1,968,282,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi

Rp62,992,000

2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Rp1,862,158,000

3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

Rp22,088,000

4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal

Rp21,044,000

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara DKI Jakarta

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta III



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono



Ditandatangani Secara Elektronik
Rina Yulia



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA III
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp90,13 M)
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp894 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp100 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta III



Ditandatangani Secara Elektronik
Rina Yulia



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta III



Ditandatangani Secara Elektronik
Rina Yulia



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Rina Yulia		NAMA	Arif Bintarto Yuwono
NIP	19700104 199603 2 001		NIP	19710912 199703 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta III		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta III		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp90,13 M)	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp894 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp100 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik

Arif Bintarto Yuwono
19710912 199703 1 001



Ditandatangani secara elektronik

Rina Yulia
19700104 199603 2 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	40 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp90,13 M)
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp894 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp100 M)



3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipkatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%



	8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									

Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Arif Bintarto Yuwono
19710912 199703 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Rina Yulia
19700104 199603 2 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL JAKARTA III
Periode s.d Triwulan IV 2025

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target s.d	Realisasi s.d.	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective	
				Triwulan IV	Triwulan IV							
Stakeholder Perspective (30%)												
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	-									114.05	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100.00%	133.72%	14.00%	29.79%	133.72	120.00	35.74	114.05	
1b-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100.00	105.29	19.00%	40.43%	105.29	105.29	42.56		
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	Max	P/M	100.00%	120.00%	14.00%	29.79%	120.00	120.00	35.74		
Customer Perspective (20%)												
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-									107.88	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100.00%	121.46%	19.00%	36.54%	121.46	120.00	43.85	113.94	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100.00%	101.19%	19.00%	36.54%	101.19	101.19	36.97		
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100.00%	100.49%	14.00%	26.92%	100.49	100.49	27.06		
Internal Process Perspective (25%)												
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-									120.00	
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74.00	117.50	14.00%	100.00%	158.78	120.00	120.00	120.00	
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-										120.00
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100.00%	123.57%	14.00%	50.00%	123.57	120.00	60.00		
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100.00%	120.00%	14.00%	50.00%	120.00	120.00	60.00		
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	-									120.00	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	231.33%	14.00%	33.33%	231.33	120.00	40.00	120.00	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	109.66%	14.00%	33.33%	156.66	120.00	40.00		
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80.00%	105.30%	14.00%	33.33%	131.62	120.00	40.00		
Learning and Growth Perspective (25%)												
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-									120.00	
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100.00	120.00	14.00%	33.33%	120.00	120.00	40.00	119.14	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100.00	120.00	14.00%	33.33%	120.00	120.00	40.00		
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80.00%	98.00%	14.00%	33.33%	122.50	120.00	40.00		
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-										118.71
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100.00	117.42	14.00%	50.00%	117.42	117.42	58.71	119.14	
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80.00	117.25	14.00%	50.00%	146.56	120.00	60.00		
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-									118.70	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80.00	99.52	14.00%	33.33%	124.40	120.00	40.00	118.70	
8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Max	P/M	95.30%	110.65%	14.00%	33.33%	116.11	116.11	38.70		
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBMM	Max	P/M	100.00	135.14	14.00%	33.33%	135.14	120.00	40.00		
NKO											116.79	

*)

*)

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537916 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III**

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	3,325,920,000	0	2,648,077,911	532,718,929	3,180,796,840	95.64 %	145,123,160
CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	1,421,671,000	0	1,124,587,931	238,426,521	1,363,014,452	95.87 %	58,656,548
CD.4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	39,700,000	0	30,324,100	8,819,328	39,143,428	98.60 %	556,572
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	39,700,000	0	30,324,100	8,819,328	39,143,428	98.60 %	556,572
AEF.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	30,269,000	0	22,949,100	7,202,000	30,151,100	99.61 %	117,900
AEF.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	4,050,000	0	3,770,000	0	3,770,000	93.09 %	280,000
AEF.003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	5,381,000	0	3,605,000	1,617,328	5,222,328	97.05 %	158,672
CD.4798 Pengelolaan Aset	1,381,971,000	0	1,094,263,831	229,607,193	1,323,871,024	95.80 %	58,099,976
AAH Peraturan lainnya	490,141,000	0	348,385,699	120,260,250	468,645,949	95.61 %	21,495,051
AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	285,257,000	0	181,464,754	98,371,040	279,835,794	98.10 %	5,421,206
AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	204,884,000	0	166,920,945	21,889,210	188,810,155	92.15 %	16,073,845
ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	15,175,000	0	13,544,100	0	13,544,100	89.25 %	1,630,900
ABA.002 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	15,175,000	0	13,544,100	0	13,544,100	89.25 %	1,630,900
BAH Pelayanan Publik Lainnya	19,664,000	0	17,852,000	1,096,000	18,948,000	96.36 %	716,000
BAH.001 Risalah Lelang	19,664,000	0	17,852,000	1,096,000	18,948,000	96.36 %	716,000
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	56,280,000	0	17,062,000	20,016,180	37,078,180	65.88 %	19,201,820
FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	28,100,000	0	5,950,000	17,489,180	23,439,180	83.41 %	4,660,820
FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian	23,490,000	0	10,020,000	0	10,020,000	42.66 %	13,470,000
FAE.007 Penggalan Potensi Lelang	4,690,000	0	1,092,000	2,527,000	3,619,000	77.16 %	1,071,000
FAK Pengelolaan Aset BUN	783,262,000	0	681,451,392	88,234,763	769,686,155	98.27 %	13,575,845
FAK.001 Aset BUN yang Dikelola	783,262,000	0	681,451,392	88,234,763	769,686,155	98.27 %	13,575,845
UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	17,449,000	0	15,968,640	0	15,968,640	91.52 %	1,480,360
UAE.201 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	17,449,000	0	15,968,640	0	15,968,640	91.52 %	1,480,360
WA Program Dukungan Manajemen	1,904,249,000	0	1,523,489,980	294,292,408	1,817,782,388	95.46 %	86,466,612
WA.4700 Legislasi dan Litigasi	61,352,000	0	48,666,250	12,297,000	60,963,250	99.37 %	388,750
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	61,352,000	0	48,666,250	12,297,000	60,963,250	99.37 %	388,750

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;

Periode Desember 2025

Kementerian : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Organisasi : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
Satuan Kerja : 537916 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III**

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	61,352,000	0	48,666,250	12,297,000	60,963,250	99.37 %	388,750
WA.4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1,814,881,000	0	1,462,246,130	272,595,408	1,734,841,538	95.59 %	80,039,462
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,363,474,000	0	1,017,804,412	272,595,408	1,290,399,820	94.64 %	73,074,180
EBA.002 Kerumahtanggaan	39,406,000	0	25,458,128	4,011,000	29,469,128	74.78 %	9,936,872
EBA.994 Layanan Perkantoran	1,324,068,000	0	992,346,284	268,584,408	1,260,930,692	95.23 %	63,137,308
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	451,407,000	0	444,441,718	0	444,441,718	98.46 %	6,965,282
EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran	52,607,000	0	51,941,718	0	51,941,718	98.74 %	665,282
EBB.003 Kendaraan Bermotor	398,800,000	0	392,500,000	0	392,500,000	98.42 %	6,300,000
WA.4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	17,494,000	0	7,549,000	9,060,000	16,609,000	94.94 %	885,000
BMB Komunikasi Publik	17,494,000	0	7,549,000	9,060,000	16,609,000	94.94 %	885,000
BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik	13,920,000	0	5,464,000	7,870,000	13,334,000	95.79 %	586,000
BMB.002 Kehumasan	3,574,000	0	2,085,000	1,190,000	3,275,000	91.63 %	299,000
WA.4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	10,522,000	0	5,028,600	340,000	5,368,600	51.02 %	5,153,400
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,522,000	0	5,028,600	340,000	5,368,600	51.02 %	5,153,400
EBD.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	10,522,000	0	5,028,600	340,000	5,368,600	51.02 %	5,153,400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.